

**Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di  
Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**HASNAWATI**

NIM: 10800113020

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnawati

NIM : 10800113020

Tempat/Tgl. Lahir : Seb. Pebenaan/07 Oktober 1994

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Insinyur Sutami No 3

Judul : Analisis Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep  
Metafora Amanah Pada Badan Amil Zakat Provinsi  
Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2017

Penyusun



**HASNAWATI**

10800113020

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul **“Akuntansi Zakat dalam Perspektif Konsep Metafora Amanah di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”** yang di susun oleh HASNAWATI, NIM : 10800113020, Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, bertepatan dengan 9 Rabi’ul Awal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 28 November 2017

9 Rabi’ul Awal 1439 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si

Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak

Pembimbing I : Lince Bulutoding, SE., M. Ak

Pembimbing II : Samarlin, SE., M. Ak

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19580221 198703 1 002



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Sang pemilik hati yang hakiki senantiasa melimpahkan nikmat rahmat-Nya, nikmat kasih sayang-Nya dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat salam kepada Nabi junjungan umat islam Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat manusia dari masa kobodohan menuju masa gemilang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“Analisis Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep Metafora Amanah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”** merupakan salah satu syarat yang harus di laksanakan guna mendapat gelar sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini menuai banyak hambatan dan rintangan, namun adanya dukungan moril maupun materil dari segenap pihak dengan penuh rasa syukur peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga dengan sangat berterimakasih peneliti menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu.

Secara khusus peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda terkasih Abd. Hamid dan ibunda tersayang Haridah dengan segala kebbaikannya telah merawat, mengasuh, dan mendidik peneliti dari kecil hingga

tumbuh menjadi sosok putri dengan segala kemampuannya mampu mengenyam pendidikan yang layak. Dan juga kepada Hasnidar dan Hasmianti saudara tersayang terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan do'a yang tiada henti kalian haturkan kepada Allah SWT. Semoga tetap berada dalam lindungan-Nya. Aamiin

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H.Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi SE.,M.Si selaku penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat dan arahan-arahan.
5. Ibu Lince Bulutoding SE.,M.Si.,Ak selaku pembimbing 1 dan Bapak Sumarlin, SE.,M.Ak selaku pembimbing II dengan segala keikhlasan telah memberikan bimbingan dan petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti.

7. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
8. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak, adik-adik, terima kasih atas persaudaraan yang telah terjalin.
10. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2013 terkhusus Akuntansi A terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabat ku Nurul Nadila Idward, Dian Pratiwi, Fatia Nirwana Imani, St Nurfaika Ramadhany, Warda Paulangi, Rika Musriani, Rizka Amelia Ningrum, Sri Wahyuni, Isra Maghfira, dan Vivi Vestyanti terima kasih atas motivasi, semangat dan do'a yang tiada henti selama berada di bangku kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman KKN di Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu, Maros terkhusus teman posko 1 yang kami sebut VVIP posko yakni Muh. Ridwan, Abd. Rahman, Muhammad Mas'ud MS, Muhammad Faisal Amin, Nasrunil Haq, Nur intan Purnamasari, Khadijah Tahir, Dian Amaliyani, dan Wiwik Mardiyatin terima kasih atas tali persaudaraan yang selalu terjalin.
13. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi peneliti.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang peneliti persembahkan ini dapat bermanfaat. peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Peneliti,

**HASNAWATI**

**10800113020**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. <i>Syariah Enterprise Theory</i> .....	19
B. Konsep Metafora Amanah.....	21
C. Zakat, Infak, dan Sedekah.....	23
D. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	28
E. Konsep Dasar Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.....	33
F. Perlakuan Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109.....	35
G. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat.....	47
H. Cerminan Amanah Sebagai Spiritual Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat.....	50
I. Rerangka Fikir.....	53
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	57



D. Metode Pengumpulan Data.....	58
E. Instrument Penelitian.....	60
F. Metode Analisis Data.....	60
G. Uji Keabsahan Data.....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan..	64
B. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Sedekah BAZ Provinsi Sulawesi Selatan.....	72
C. Zakat, Infaq, dan Sedekah menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	83
D. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sulawesi Selatan.....	88
E. Pengelolaan Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep Metafora Amanah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran dan Implikasi penelitian.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : komponen laporan keuangan PSAK 101 dan PSAK 109.....	7
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.1 : Laporan Posisi Keuangan.....	43
Tabel 2.2 : Laporan Perubahan Dana.....	44
Tabel 2.3 : Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	46
Tabel 3.1 : Biodata informan.....	58
Tabel 4.1 : Jurnal Penerimaan Kas.....	92
Tabel 4.2 : Jurnal Pengeluaran Kas.....	92
Tabel 4.3 : Hasil Penelitian Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Pada Pengelolaan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.....	96
Tabel 4.4 : Laporan Dana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.....	98
Tabel 4.5 : Hasil Penelitian Perbandingan Pengungkapan dan Penyajian Pada Pengelolaan Akuntansi Zakat Di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.....	100
Tabel 4.6 : Hasil Penelitian Perbandingan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Provinsi Selatan.....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Fikir.....	54
Gambar 3.1 : Metode analisis data.....	61
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	68
Gambar 4.2 : Mekanisme Pengelola Zakat.....	80



## ABSTRAK

**Nama : Hasnawati**

**Nim : 10800113020**

**Judul : Analisis Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep Metafora Amanah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan akuntansi zakat menggunakan pendekatan konsep metafora amanah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang atau fenomena yang diamati, dengan pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikaji dengan menggunakan ayat Al-Qur'an di dalamnya.

Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan meliputi proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat masing-masing di ikuti di ikuti dengan adanya sifat STAF yakni *Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah*. Berdasarkan pendekatan amanah, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakui, mengukur, mengungkap dan menyajikannya telah sesuai dengan prinsip metafora amanah. Sejatinya, memandang bahwa segala sesuatu yang di titipkan oleh muzakki merupakan amanah pula dari Allah SWT. Implikasi penelitian ini perlunya Sumber Daya Manusia yang lebih cakap dalam mengelola keuangan hingga mencatatnya sesuai dengan standar yang berlaku yakni berpegang pada PSAK 109.

**Kata kunci : Akuntansi, Zakat, Metafora Amanah, *Syariah Enterprise Theory*, PSAK 109.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama islam terbesar. Seiring berjalannya waktu, indonesia tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar pula. Sehingga berdirilah berbagai lembaga-lembaga yang berupaya menangani zakat, salah satunya adalah adanya Organisasi Pengelola Zakat yakni Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam ajaran Islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan Negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infaq, dan sedekah.

Jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya, kolektivitas pengumpulan zakat masih jauh dari harapan (Nikmatunyah,2014). Adapun penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah masih rendahnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari Badan Zakat Nasional. Padahal penyaluran zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat yang belum sepenuhnya efisien dan efektif .

Potensi zakat di Kota Makassar sendiri mencapai kurang lebih Rp 7 milyar, namun BAZ Kota Makassar belum mampu mencapai jumlah itu, padahal dari 1,3 juta penduduk Makassar 80% diantaranya adalah beragama muslim (Fardan Ngoyo dan



Lince, 2015). Besarnya potensi zakat tidak seimbang dengan dana zakat yang terkumpul melalui lembaga. Artinya, di satu sisi petugas BAZNAS masih kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia. Selain itu adanya faktor ketidakpercayaan muzakki pada pengelolaan dana zakat baik itu Badan Amil Zakat di karenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, akuntabilitas dari pihak Badan Amil Zakat serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di salurkan melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Septiarini, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut (Endahwati, 2014).

Perkembangan Badan Amil Zakat perlu di ikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat (Yuni, 2013 dalam Hasnawati, 2016). Sebagaimana kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat di pakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertikal–keTuhanan dimana perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Sebagaimana ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'<sup>[44]</sup>. (QS.Al-Baqarah/2:43)

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat merupakan penyempurna ibadah lainnya seperti sholat. <sup>[44]</sup> yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat di tingkatkan (Kristin P, 2011). Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki landasan kuat di dalam Al Qur'an, yaitu Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah/9:103).

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat memiliki keharusan lebih utama untuk dilaksanakan, kemudian diikuti dengan infak dan sedekah bila masih mampu. Dengan demikian, Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada *stakeholders*

terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. Senada dengan hal itu Ipansyah (2013) menyatakan agar zakat yang di keluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) dapat mencapai sasaran, maka di perlukanlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pemberian kewajiban syariah dari muzakki ke *mustahiq* dapat melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Sedangkan Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum islam. Untuk itu di perlukan akuntansi, jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Yakni dalam membagi dan menyalurkan seluruh harta kepada yang berhak (Adi dan Syarif, 2009).

Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah) (Jasafat, 2015). Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini

disebut sistem pencatatan *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Sistem ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan. Sehingga diakhir periode dapat dinilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan dapat menjadi acuan untuk pengelolaan zakat dan infak/sedekah selanjutnya serta dapat dilihat seberapa besar pertanggung jawaban Badan Amil Zakat tersebut.

Akuntansi sebagai sebuah seni pencatatan di kembangkan dengan tujuan melihat pertanggungjawaban suatu lembaga maupun organisasi. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ  
وَأَن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَ كُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>[179]</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimfakkan, Maka hendaklah walinya mengimfakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada duaorang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yangdemikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah/2:282)

<sup>[179]</sup> *Bermuamalah* ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menjadi kegiatan dibidang tertentu perlu untuk dicatat, akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Artinya, setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di catat dan dilaporkan kepada para *stakeholders* sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat. Dimana kualitas pada suatu Lembaga Pengelola Zakat



seperti Badan Amil Zakat harus dapat diukur, yaitu amanah, professional serta transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat infaq dan sedekah ini rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan mampu di minimalisasi (Yulinartati,*dkk* 2012).

Istutik (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah. Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dan ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut sebagai amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi mengatur tentang zakat infak dan sadaqah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 1.1

*komponen laporan keuangan PSAK 101 dan PSAK 109*

PSAK 101	PSAK 109
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Neraca laporan posisi keuangan</li> <li>➤ Laporan laba rugi</li> <li>➤ Laporan perubahan ekuitas</li> <li>➤ Laporan arus kas</li> <li>➤ Laporan sumber dan penggunaan dana zakat</li> <li>➤ Laporan sumber dana zakat dan penggunaan dana kebajikan</li> <li>➤ Catatan atas laporan keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Neraca (laporan posisi keuangan)</li> <li>➤ Laporan perubahan dana</li> <li>➤ Laporan perubahan aset</li> <li>➤ Laporan arus kas</li> <li>➤ Catatan atas laporan keuangan</li> </ul>

*Sumber: istutik (2013)*

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab II Pasal 7 poin ke 4 yang mengatur tugas atau fungsi dari amil zakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat.

Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh suatu Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat akan menambahkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah kepada lembaga tersebut. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban amil terhadap para muzakki dan kepada Allah SWT. Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian data yang lengkap namun juga benar adanya. Karena meskipun masyarakat dalam hal ini muzakki tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan data yang benar, ada yang lebih mengetahui secara detil yaitu Allah SWT (Salle, 2015). Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para pelaku ekonomi, khususnya dalam hal ini Badan Amil Zakat. Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, kemuliaan ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan syariah yaitu selalu ingat akan pengawasan Allah SWT.

Penelitian yang berfokus pada pengelolaan akuntansi zakat telah banyak dilakukan dengan konteks berbeda seperti organisasi bisnis, pemerintahan, organisasi

sosial keagamaan baik yang bernuansa kristen maupun bernuansa islam. Sebagaimana Nikmatuniayah (2012) dengan tujuan penelitiannya berfokus pada penyajian laporan keuangan ZIS untuk publik dengan hasil penelitiannya bahwa dengan menyajikan laporan zakat untuk publik maka pengelola menjadi lebih amanah dan masyarakat (muzakki) menjadi percaya pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu penelitian Huda dan Sawarjowo (2013) membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan *modifikasi action research* dengan hasil penelitiannya menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data muzakki dan *mustahiq* tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil profesional. Dari beberapa penelitian tersebut hanya menonjolkan sifat fisik yang menggunakan media laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan aspek mental yang terlihat dalam organisasi keagamaan, belum memprioritaskan aspek spiritual, yang memang bersifat abstrak (Endahwati, 2014). Namun dalam penelitian ini lebih mengkhususkan aspek spiritualnya dengan menekankan pada kajian yang menggunakan pendekatan metafora amanah sebagai landasan dalam mengelola akuntansi zakat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintikan kejujuran, tanggungjawab serta transparan kepada para muzakki atau pembaca laporan keuangan lainnya.

Kejujuran (amanah) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas (Salle, 2015). Dengan demikian, akuntabilitas merupakan sebuah arena perebutan dominasi dan legitimasi yang kompleks (Efferin, 2015). Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai alat pertanggung

jawaban atas sumber daya yang digunakan secara finansial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Triyuwono (2006:334) bahwa akuntansi bukan saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemilik, melainkan juga pada *stakeholders* dan Tuhan. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin (Muhammad,2006).

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “**Analisis Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep Metafora Amanah (Studi pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan)**”

### ***B. Rumusan Masalah***

Sebagai pihak pengelola dana ZIS, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu membangun dan meningkatkan *trust* (kepercayaan) masyarakat, terutama yang berhubungan dengan akuntabilitas pelaporan yang diberikan terhadap muzakki sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282, dimana para *mustahiq* harus mampu membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional. Artinya, semua proses harus benar-benar dilakukan secara bertanggungjawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahiq* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya (Kristin P dan Umah,2011).

Sehubungan dengan standar akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK 109, Istutik (2013) menyatakan bahwa masih ada lembaga amal belum menerapkan standar

akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya (Sartika, 2008). Akuntabilitas mencakup pertanggung jawaban atas apa yang dikelola dengan performa pengelolaannya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Triyuwono, 2006a). Bentuk akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar selalu terhubung dengan nilai-nilai sunnatullah yang tercermin dalam nilai yang penuh dengan amanah yaitu nilai kejujuran.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : **Bagaimanakah Pengelolaan Akuntansi Zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Konsep Metafora Amanah?**

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Memahami secara mendalam Pengelolaan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dilihat dari *Konsep Metafora Amanah*.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat penelitian ini ditujukan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dimana jika ditinjau dari segi teoretisnya antara lain untuk mendukung keberadaan *Syariah Enterprise Theory* oleh (Triyuwono 2006a:356). Berupa



nilai keseimbangan yang tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi juga memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas, dimana *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Sehingga dengan terciptanya insan yang unggul dalam menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi akan mampu meningkatkan kaidah keamanan pada lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian ini *Syariah Enterprise Theory* akan direfleksikan oleh konsep metafora amanah yang juga memiliki komponen berupa jujur, adil, dan tegas dalam mengambil sikap yang merupakan bentuk pertanggungjawaban (amanah) nya terhadap sekitarnya. Sehingga keberadaan *Syariah Enterprise Theory* ini akan mempunyai titik dimana keakuntabilisan menjadi otoritas bagi para lembaga pengelola zakat sehingga harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk memberikan kesejahteraan pada para *mustahiq* (Mansur,2012).

## 2. Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

Bagi peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai akuntansi zakat menggunakan pendekatan metafora amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban baik kepada manusia maupun kepada Tuhan sang pencipta.
- 2) Sebagai salah satu acuan untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti selama kuliah.

Bagi lembaga

- 1) Di harapkan dapat memberi kontribusi bagi Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) berbasis konsep metafora amanah. Dengan demikian dapat dijadikan bahan perbaikan pada lembaga tersebut sehingga mampu memberi kesejahteraan para *mustahiq*, dan para muzakki tetap percaya pada lembaga yang diberikan amanah.
- 2) Menjadi acuan dalam melaksanakan tugas mulia yang di emban sebagai perpanjangan tangan dari Allah SWT kepada hambaNya.

#### **E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari apa yang akan diteliti. Penelitian tentang zakat telah diteliti oleh Hamidi dan Suwardi (2013), dengan judul penelitian “*Analisis Akuntabilitas Public Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi (Survey pada Pengelola Zakat di Indonesia)*” dengan sampel untuk Organisasi pengelola zakat sebanyak 36 responden, Lembaga Amil Zakat sebanyak 16 responden, dan Badan Amil Zakat sebanyak 18 responden. Menemukan hasil bahwa dari pengujian pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik secara simultan ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik.

Variabel pengendalian intern dan budaya organisasi menjelaskan variabel akuntabilitas publik sebesar 63.1%, sedangkan sebesar 36.9% dijelaskan variabel lain

yang tidak diteliti. Hal ini berarti bahwa pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat. Serta dilihat dari pengujian t test menunjukkan perbedaan akuntabilitas publik dan kinerja organisasi antara lembaga amil zakat (LAZ) dengan badan amil zakat (BAZ). Rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Iva Hardiyanti Sholikhah (2014) yang berjudul *“Persepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang”* menyimpulkan jika dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS dan PKPU memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan juga bank konvensional. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama system transfer melalui rekening bank konvensional dan hal itu tidak lepas dari munculnya dana non halal. Saat penerimaan dari sumber lain yaitu pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah islam adalah haram. Penelitian ini menekankan pada penyusunan laporan keuangan BAZNAS dan PKPU masih belum mengacu pada PSAK No 109 karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. BAZNAS dan PKPU juga telah menyajikan dana dan dana halal pada laporan keuangan secara terpisah, akan tetapi belum mengungkapkan dana non halal pada laporan keuangan.

Penelitian tentang akuntansi zakat juga telah diteliti mengenai *“Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang”* oleh Nikmatuniayah (2012) mendapatkan hasil penelitian yang secara signifikan bahwa pengelolaan dana zakat melalui pembukuan yang memadai dan proses

pelaporan keuangan zakat mendukung akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat yang dibutuhkan pemakai. Dan penelitian oleh Harianto dan Diana (2014) dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe*” bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek penelitian berdasarkan data yang ada dan memberikan analisis perbandingan antara PSAK 109 dengan yang di terapkan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dengan ruang lingkup analisis meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan. Menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan system pencatatan *single entry accounting* dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah dengan menerapkan pendekatan *cash basis*.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Metari Setiaware (2013) dengan judul penelitian “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Makassar*” mendapat hasil bahwa penerapan akuntansinya menggunakan system akuntansi dana dengan memisahkan dana menurut peruntukannya. Pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Selain itu pengungkapan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian terdahulu**

<b>N o</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Metode penelitian dan Hasil penelitian</b>
<b>1.</b>	<b>Hamidi dan Suwardi (2013)</b>	Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi (Survey pada Pengelola Zakat di Indonesia)	Menggunakan Pendekatan kuantitatif dengan teknis metode survey. Hasil penelitian bahwa pengendalian intern dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntabilitas publik dengan pengaruh yang kuat. Rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja LAZ lebih tinggi dari rata-rata akuntabilitas publik dan kinerja BAZ.
<b>2.</b>	<b>Iva Hardiyanti Shoikah (2014)</b>	Persepsi, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengungkapan dana non halal pada BAZNAS dan PKPU belum sesuai dengan standar PSAK 109, namun dalam pencatatannya sudah dipisahkan secara tersendiri namun tidak dimunculkan dalam laporan keuangan.
<b>3.</b>	<b>Nikma tuniayah (2012)</b>	Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola	Penelitian kualitatif. Pengelolaan dana zakat melalui pembukuan yang memadai dan proses pelaporan



		Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang.	keuangan zakat mendukung akuntabilitas laporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat yang dibutuhkan pemakai.
4.	<b>Harianto dan Diana (2014)</b>	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menerapkan system pencatatan <i>single entry accounting</i> dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah dengan menerapkan pendekatan <i>cash basis</i> .
5.	<b>Andi metari setiawari (2013)</b>	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Makassar.	Penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Penerapan akuntansinya menggunakan system akuntansi dana dengan memisahkan dana menurut peruntukannya. Pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan.

Dari beberapa penelitian terdahulu hanya menonjolkan aspek fisik, namun dalam penelitian ini lebih kepada aspek spritualnya yakni akuntansi zakat akan di refleksikan menggunakan konsep metafora amanah. Dimana, konsep metafora amanah memiliki nilai kejujuran, keadilan dan ketegasan sehingga dapat dijadikan pedoman agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat. Serta mampu meningkatkan kepercayaan muzakki untuk tetap menyalurkan zakatnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Syariah Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini, 2014).

Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan dan pendekatan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *Entity Theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stakeholders* sebagai pusat, sehingga *Syariah Enterprise Theory* ini sangat erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat karna mampu untuk menjawab segala aspek yang berkaitan

secara mendasar didalamnya utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat.

*Syariah Enterprise Teory* menyeimbangkan nilai egoistik (*maskulin*) dengan nilai altruistik (*feminin*), nilai materi (*maskulin*) dengan nilai spiritual (*feminin*). Dalam syari'ah islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai *egoistik-altruistik*, *materi-spiritual*, dan individu-jamaah. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada tuhan dengan jiwa yang tenang. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung antara muzakki maupun pengelola zakat lebih membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang diamanahkan dan diberi amanah sehingga para penggunanya tetap terjamin (*Mustahiq*). Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Hal ini tercermin dalam konsep metafora amanah dimana nilai, tata cara dan praktek hidup yang diatur islam merupakan sebuah dimensi universal yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia, di dunia maupun di akhirat. Selain itu amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Triyuwono juga mengemukakan *Syariah Enterprise Theory*, yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan (*Entity Theory*). Sementara *ET* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat *altruistic*. Hal ini menunjukkan

bahwa *Syariah Enterprise Theory* memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. *Syariah Enterprise Theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *ET*. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam.

### ***B. Konsep Metafora Amanah***

Amanah dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya milik Allah dan manusia adalah seseorang yang diberi amanah untuk menyebar misi sakral yang ditugaskan kepadanya. Tujuan organisasi menurut Islam adalah menyebarkan rahmat bagi semua makhluk (Kalbarini, 2014). Tujuan itu pada hakekatnya tidak terbatas pada kehidupan dunia individu, tetapi juga kehidupan setelah dunia ini. Morgan (1986) dalam Triyuwono (2000:10) menyatakan bahwa metafora adalah suatu cara berpikir dan melihat yang mempengaruhi cara seseorang melakukan interpretasi dan memahami realitas sosialnya. Kalbarini (2014) menyatakan bahwa metafora amanah dalam bentuk operasional bisa diturunkan menjadi metafora zakat atau realitas organisasi yang di metaforakan dengan zakat (*zakat metaphorized organisational reality*). Senada dengan Koni (2014) bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus didasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*) sebagai khalifah di bumi mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitas harus sesuai dengan kekuatan Tuhan (*the will of God*) dan dapat bermanfaat bagi sesama makhluk Tuhan (*rahmatan lil alamin*).

Pemahaman konsep organisasi dalam konteks amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah untuk mencari ridha Allah. Ini merupakan bentuk pencapaian paling tinggi, lebih tinggi dari ukuran

*materialisme*. Dalam tataran tersebut, tujuan lembaga tidak bisa dibatasi hanya untuk memperoleh laba yang maksimal guna meningkatkan kekayaan pemilik, tetapi perlu juga diarahkan pada pemenuhan tuntutan sosial masyarakat yang selama ini selalu terabaikan (*stakeholder oriented*) disamping menjaga kelestarian alam lingkungan (*environment oriented*) (Triyuwono, 2006:352).

Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat penghubung antara *stakeholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stakeholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *Syariah Enterprise Theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh banyak pihak.

Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat (Kholis dkk, 2013). Pemaknaan konsep akuntabilitas dalam penelitian ini menekankan pada pengelolaan akuntansi zakat yang merupakan bentuk amanah dari Allah, yaitu atas dasar nilai-nilai spiritual yaitu didukung oleh tiga nilai kejujuran yang dapat diterapkan agar bisa berhasil dalam menjalankan amanah, yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, serta kejujuran batiniah.

Dalam konteks metafora amanah, tujuan lembaga yang memaksimalkan laba tidak lagi relevan. Metafora amanah ini dapat dijelaskan pada hal yang lebih operasional lagi yaitu zakat. Organisasi dengan metafora amanah ini tidak saja



mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia tetapi juga kesejahteraan (kelestarian) alam yang dikelola dengan cara-cara yang adil dengan menggunakan potensi internal yaitu dengan akal dan hati (Kholmi, 2012). Dalam tradisi islam atau organisasi yang menggunakan metafora amanah, Badan Amil Zakat harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika yaitu etika yang diformulasikan dalam bentuk syariah. Dalam pengertian luas, syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Bila metafora ini secara sadar diterima dan di praktikkan dalam kegiatan pada suatu lembaga secara lebih menyeluruh, maka akan tercipta apa yang dinamakan dengan realitas organisasi dengan jaringan-jaringan kuasa Ilahi.

### ***C. Zakat infaq dan Sedekah***

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, Menurut PSAK NO. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah (Fardan Ngoyo dan Lince, 2015).

#### **1. Dasar hukum zakat**

Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk

diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke Tuhanan, juga ekonomi sosial (Nuruddin, 2006:1). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

- a. QS. al-Taubah ayat 103
- b. QS.al-Baqarah ayat 43
- c. QS.al-Hajj ayat 78.
- d. QS. Ali 'Imran ayat 180.

Berdasarkan beberapa ayat Al-quran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-quran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain (Hakiem, 2012).

## **2. Golongan yang berhak menerima zakat/*Mustahiq* zakat**

Kelompok penerima zakat itu dikenal dengan *asnaf*, yaitu:

#### **a. Fakir**

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu (Kurnia dan Hidayat, 2008). Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

#### **b. Miskin**

Miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan *dharury* (primernya) namun tidak mampu memenuhi kebutuhan *hajiyy* (semi primernya).

#### **c. Amil zakat**

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Yaitu siapa saja antara kaum muslimin yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk mengurus zakat dan tidak ditetapkan gaji khusus sebagai imbalan pekerjaannya.

#### **d. Muallaf**

Yaitu seorang muslim yang dipandang perlu diberikan kekuatan *financial* untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitasnya terhadap islam.

**e. Riqab**

Yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan. artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belia dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.

**f. Gharim**

Yaitu seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak menerima zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat atau teka terbuksi taubatnya.

**g. Fi Sabilillah**

*Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Meliputi setiap amalan yang mensyiarkan islam, melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

**h. Ibn Sabil**

Orang yang dalam perjalanan (*ibn sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

**3. Hikmah dan Tujuan zakat**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama ummat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan

dengan hubungan manusia dengan Tuhan Nya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia adalah :

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang disekitarnya dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Dapat menolong membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *ummatan wahidan* (ummat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah*, dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab sosial bersama).
- e. Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta sosial (*social distruction*) keseimbangan dalam kepemilikan harta (*social ownership*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Zakat adalah ibadah maliyyah yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

g. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir dan batin (Kartika sari, 2007:13).

Menurut Fahrur Mu'is (2011:32), tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin
- 2) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*
- 3) Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin

#### ***D. Organisasi Pengelola Zakat***

##### **1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat menurut Widodo dan Teten (2001:6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Badan Amil Zakat. setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara'.

OPZ merupakan istilah lain dari amil zakat. Bedanya, jika amil zakat dapat dibentuk oleh perorangan, OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. Amil zakat adalah salah satu golongan dari tujuh golongan yang berhak menerima zakat. Menurut



Hafidhuddin (2007: 48), amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknya dana zakat. Fatwa MUI nomor 9 Tahun 2011 mendefinisikan amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- b. Seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

## **2. Bentuk dan Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat**

### **a. Bentuk OPZ**

Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi menjadi dua jenis:

- 1) Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut UU No 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat dibentuk di tingkat nasional dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
- 2) Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga Amil Zakat kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah setelah memenuhi syarat yang disebutkan UU No 23 Tahun 2011 pasal 18, yaitu :

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b) berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d) memiliki pengawas syariat.
- e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f) bersifat nirlaba
- g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dimana keduanya harus berorientasi pada pemecahan problem masyarakat terutama masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. BAZNAS bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia (Rahayu,2014).

Badan Amil Zakat merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena Badan Amil Zakat merupakan organisasi

nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di mana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya (Endahwati, 2014; Megawati dan Fenny 2014). Sebagaimana di Malaysia, konstitusi telah mencatat bahwa zakat di bawah otoritas Negara, Penguasa Melayu atau Yang Dipertuan Agungan memiliki bentuk hukum Islam sendiri yang sejalan dengan ketentuan konstitusi. Biasanya ketentuan yang berkaitan dengan zakat merupakan bagian dari hukum tersebut. Semua hal yang berkaitan dengan agama adalah tanggung jawab Dewan Islam. Sedangkan kantor Dewan Islam di masing-masing negara biasanya dikenal berbagai nama, seperti Zakat dan Baitulmal Office, Zakat Komite, Zakat Satuan atau Departemen Zakat.

Disisi lain belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar zakat dalam peraturan perundang- undangan (Rahayu ,2014). Namun dengan adanya badan pengelola ZIS tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan, karena pengumpulan dana penghimpunan ZIS terus meningkat. Namun disisi lain hal ini memunculkan tantangan bagi pendayagunaan dana ZIS agar efektif dan berdampak luas di masyarakat. Sehingga Lembaga Pengelola Zakat dituntut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi.

### **3. Karakteristik OPZ**

Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001:11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya

#### **4. Syarat dan Tugas OPZ**

Fatwa MUI nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat juga telah mengatur syarat OPZ. Dalam fatwa tersebut disebutkan syarat amil zakat antara lain:

- a. Muslim
- b. Mukallah (Berakal dan Baligh)
- c. Amanah
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan amil zakat.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

- 1) Mengumpulkan zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa dalam upaya mengumpulkan zakat, amil zakat harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para muzakki. Selain itu, muzakki juga harus melakukan perhitungan sendiri zakat mereka. Muzakki meminta bantuan kepada amil zakat apabila menemui kesulitan. Selain zakat, OPZ juga dapat menerima harta seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, waris, dan kafarat.

- 2) Memelihara zakat Setelah zakat dari para muzakki terkumpul, tugas selanjutnya yang harus dilakukan OPZ adalah memelihara zakat tersebut. Pemeliharaan zakat ini termasuk inventarisasi harta, pemeliharaan harta zakat, dan pengamanan harta zakat.
- 3) Mendistribusikan zakat Al Nawawi (n.d.) dalam Qardawi (2004) menyatakan bahwa dalam upaya pendistribusian zakat, pengelola zakat harus menentukan siapa saja penerima zakat, apa yang mereka butuhkan, dan memastikan zakat tersebut segera diterima oleh para *mustahiq*. Dalam fatwa MUI no 8 tahun 2011 tentang amil zakat, pelaporan harta zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq juga menjadi poin penting dalam pendistribusian zakat.
- 4) Mendayagunakan zakat Sesuai dengan UU no 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, OPZ bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat agama. Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan, dan berdasarkan skala prioritas. Hasil penerimaan infak, sedekah, wasiat, wakaf, dan waris, juga bisa didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif (Sari, 2012).

#### ***E. Konsep Dasar Akuntansi Zakat, infaq, dan Shadaqah***

Pengertian Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICOA) adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya (Triuwono, 2006: 33). Secara umum dapat disimpulkan bahwa

akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Zakat tentunya memiliki beberapa karakteristik, dan karakteristik tersebut tercantum di dalam PSAK No. 109 yang menjelaskan beberapa macam karakteristik zakat.

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan (Endahwati, 2014). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Parmono, 2010). Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi tersebut, menurut Husein Sahatah (1997) dalam Kristin P dan Umah (2011) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi



yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

Sebagaimana Mahmudi (2003:4) tujuan dari akuntansi zakat ada 2, yaitu yang pertama Pengendalian Manajemen (*Management Control*) dan akuntabilitas (*Accountability*). Tujuan pengendalian manajemen ini ditujukan untuk kepentingan internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan akuntabilitas memberikan informasi untuk organisasi pengelolaan zakat untuk melaporkan tanggung jawabnya terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan efisien untuk masyarakat.

#### ***F. Perlakuan Akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109***

##### **1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat**

###### **a. Pengakuan awal zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, Jika diterima dalam bentuk kas maka di akui sebesar jumlah yang diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas maka di akui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal : *Dr. Kas- Dana zakat* Rp xxx

*Dr. aset non kas (nilai wajar)- dana zakat* Rp xxx

*Kr. dana zakat* Rp xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

Jurnal : *Dr. dana-zakat* Rp xxx

*Kr. dana zakat- amil* Rp xxx

*Kr. dana zakat- non amil* Rp xxx

Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal : *Dr. Kas- dana zakat* Rp xxx

*Kr. Dana zakat- non amil* Rp xxx

#### **b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

*Dr. Dana zakat- non amil*                      Rp xxx

*Kr. Aset non kas*                                      Rp xxx

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

*Dr. Dana- amil- kerugian*                      Rp xxx

*Kr. Aset non kas*                                      Rp xxx

### c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

*Dr. Dana zakat- non amil*                      Rp xxx

*Kr. Kas- dana zakat*                                      Rp xxx

- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

*Dr. Dana zakat- non amil*                      Rp xxx

*Kr. Aset nonkas- dana zakat*                      Rp xxx

### d. Pengakuan Awal infak dan sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jurnal :

*Dr. Kas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

*Dr. Aset nonkas (nilai wajar)-lancar-dana infaq* Rp xxx

*Dr. Aset non kas (nilai wajar)-tidak lancar-dana infaq* Rp xxx

*Kr. Dana infaq dan sedekah* Rp xxx

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

*Dr. Dana- infaq/sedekah* Rp xxx

*Kr. Dana infaq/sedekah-amil* Rp xxx

*Kr. Dana infaq/sedekah-nonamil* Rp xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### **e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq dan Shadaqah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti *mobil ambulance*. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan

sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

- 1) *Dr. Dana infak/sedekah- nonamil* Rp xxx  
*Kr. Akumulasi penyusutan aset non lancar* Rp xxx

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 2) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

*Dr. Dana infaq/sedekah-non amil* Rp xxx  
*Kr. Aset non kas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

- 3) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

*Dr.dana infaq/sedekah-kerugian* Rp xxx  
*Kr. Aset nonkas-dana infaq/sedekah* Rp xxx

Sebelum disalurkan, dana infaq/sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil tersebut diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.

*Dr. Kas/piutang-infaq/sedekah* Rp xxx  
*Kr. Dana infaq/sedekah* Rp xxx

#### **f. Penyaluran Infaq dan Shadaqah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- 1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas  
*Dr. Dana infaq/sedekah-nonamil* Rp xxx  
*Kr. Kas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

- 2) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

*Dr. Dana infak/sedekah- nonamil* Rp xxx

*Kr. Aset nonkas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

*Dr. Dana infaq/sedekah- nonamil* Rp xxx

*Kr. Kas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

*Dr. Piutang- dana infaq/sedekah* Rp xxx

*Kr. Kas- dana infaq/sedekah* Rp xxx

#### **g. Dana Non Halal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.



### 1) Penyajian Zakat, Infaq, Dan Shadaqah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### 2) Pengungkapan

#### a) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (3) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (4) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*.
- (5) hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### b) Infaq dan sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (1) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas

- (2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (3) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- (4) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- (5) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- (6) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- (7) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah
- (8) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- (9) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

(1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

(2) Kinerja amal atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

**c) Laporan Keuangan Amil**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amal terdiri dari:

(1) Neraca (laporan posisi keuangan)

Tabel 2.1

**Neraca (Posisi Laporan Keuangan)**

**BAZ XXX**

**Per 31 Desember 2xxx**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<i>Aset</i>		<i>Kewajiban</i>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>kewajiban jangka pendek</i>	
kas dan setara kas	xxx	biaya yang masih harus dibayar	xxx
instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>kewajiban jangka panjang</i>	
		imbalan kerja jangka panjang	xxx
		jumlah kewajiban	xxx
<i>aset tidak lancar</i>		<i>saldo dana</i>	
aset tetap	xxx	dana zakat	xxx
akumulasi		dana infaq/sedekah	xxx
penyusutan	(xxx)	dana amal	xxx
		dana non halal	xxx
		jumlah dana	xxx
jumlah asset	xxx	jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

## (2) Laporan perubahan dana

Tabel 2.2

**Laporan Perubahan Dana****BAZ XXX****Per 31 Desember 2xxx**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki indiidual	xxx
hasil penempatan	<u>xxx</u>
jumlah penerimaan dana zakat	xxx
bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>jumlah penerimaan dana zakat dan setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
ibn sabil	<u>(xxx)</u>
<i>jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	<u>xxx</u>
saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
infak/sedekah atau muqayyadah	xxx
infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
hasil pengelolaan	<u>xxx</u>

<i>jumlah peneimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
alokasi pemanfaatan aset kelolaan (penyusutan)	(xxx)
<i>jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	<u>xxx</u>
saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
bagian amil dari dana zakat	xxx
bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
penerimaan lainnya	xxx
<i>jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	(xxx)
beban pegawai	(xxx)
beban penyusutan	(xxx)
beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	<u>xxx</u>
saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
bunga bank	xxx
jasa giro	xxx
penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<i>jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>jumlah pengglalunaan dana non halal</i>	(xxx)
surplus (defisit)	xxx
saldo awal	xxx

saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, infak, sedekah, dana amil dan dana non halal</b>	xxx

*Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (2008) dalam Harianto (2014).*

(3) Laporan perubahan aset kelolaan

Tabel 2.3

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**BAZ XXX**

**Per 31 Desember 2xxx**

	saldo awal	penam bahan	pengu rangan	penyi sihan	akm pen yusutan	saldo akhir
Dana infak, sedekah- aset kelolaan lancar (piutang bergulir)	xxx	xxx	xxx	Xxx	—	xxx
Dana infak, sedekah- aset kelolaan tidak lancar (rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	—	xxx	xxx

*Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia (2008) dalam Harianto (2014).*

(4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

(5) Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.



### ***G. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat***

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik juga tersirat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Kemudian Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat (Kholis dkk,2013). Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat penghubung antara *stakeholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stakeholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *Syariah Enterprise Theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditentukan oleh banyak pihak. Dalam hal ini reputasi sikap amanah dan profesionalitas merupakan modal utama bagi lembaga-lembaga zakat.

Unsur pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan harus lebih diutamakan dari sekedar aspek pembuatan keputusan, dengan menjadikan zakat sebagai aspek utama dalam pelaporan keuangan, maka dapat dihindari perbedaan kepentingan antara berbagai pihak pemakai laporan keuangan. Disamping itu dapat dihindari berbagai jenis praktek kecurangan dalam pelaporan keuangan, seperti *window dressing* dan penyajian informasi yang menyesatkan pemakai laporan.

Akuntansi yang berbasis pada zakat mampu menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat, sebab konsep zakat tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab seseorang terhadap lingkungan sosialnya.

Informasi kuantitatif yang bersifat keuangan (informasi akuntansi) merupakan sumber informasi utama dalam mengelola organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Tujuan dari pelaporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan ini tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama pelaporan keuangan (*zakat purpose*), baik dalam hal konseptual, maupun dalam hal teknis. Sifat-sifat buruk, seperti tamak dan egois tidak mendapat tempat dalam akuntansi Islam, sehingga konsep akuntansi Islam ini dapat menghindari kerusakan langit dan bumi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Akuntabilitas mampu menghasilkan nilai utama yaitu profesional. Professional pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat mewujudkan nilai yang amanah dan transparan. Akuntabilitas yang merupakan suatu hal yang kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga publik, masyarakat perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Sebagai lembaga umat yang dijadikan sebagai naungan, Badan Amil Zakat sebagai Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi meskipun mereka secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan ZIS (Yulinartati dkk,2012).

Akuntabilitas timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent principal relationship* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (muzakki) dan Tuhan. Berdasarkan fenomena mengenai kualitas informasi yang terjadi di Badan Amil Zakat adalah karena belum

terdisiplinnya akuntabilitas yang baik dimana sebagian besar Lembaga Amil Zakat belum melakukan pengelolaan zakat secara profesional, transparan dan akuntabel (Yusuf, 2010 dalam Komala,2014). Kebanyakan lembaga pengelola zakat (Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat) masih belum efektif dalam menghimpun serta menyalurkan dana, dimana masih ada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat yang dananya tidak digunakan dalam waktu lama hingga miliaran rupiah, hal ini menandakan bahwa lembaga tersebut kurang bekerja dengan baik. Berikutnya hal ini tentunya akan membuat para muzakki menjadi cemas akan dana yang diamanahkan pada lembaga tersebut. Keberhasilan zakat pada suatu lembaga tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (*sesuai dengan nas*) secara tepat guna.

Badan Amil Zakat memiliki tanggung jawab besar mengurus dana zakat masyarakat, dan kenyataan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan, maka lembaga tersebut menggunakan sistem akuntansi dan harus dipertanggungjawabkan segala operasi keuangannya, dan sebagai lembaga keuangan, bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Dalam upaya mengatur akuntabilitas atau kemampuan mempertanggungjawabkan laporan keuangan suatu badan keuangan, maka IAI mengeluarkan PSAK yang mengatur sistem pencatatan badan dan lembaga keuangan. Khusus untuk BAZIS dan LAZIS, IAI mengeluarkan PSAK 109 yaitu untuk badan dan Lembaga Zakat Infaq Shadaqah. Standar Akuntansi Zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat,dan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan

sebagai berikut : penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah).

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap untuk diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Di dalam PSAK 109 terdapat panduan standar dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan shadaqah.

#### ***H. Cerminan Amanah sebagai spiritual pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat***

Dalam Islam, konsep amanah sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Amanah berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian, dan ketegasan. Untuk menjalankan amanah, seseorang perlu keberanian yang tegas dengan menerima konsekuensi dari apa yang diperbuat. Seseorang yang diberikan amanah disebut dengan wali amanat (*steward*) yang dapat menjaga dan mengatur sendiri amanah yang diberikan kepadanya, islam memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah. Kepemilikan tersebut adalah mutlak milik Allah dan manusia hanya sebagai perpanjangan tangan dari Nya.

Konsep amanah merupakan bagian universal yang kemudian diturunkan menjadi akuntabilitas, sebuah konsep Barat yang diturunkan dari teori agensi (Kholmi, 2012). Pertanggungjawaban dalam perspektif amanah tidak hanya bertitik pada pertanggungjawaban di dunia, namun juga akan berlanjut pertanggungjawaban di akhirat. Perspektif amanah yang selanjutnya oleh Triyuwono dijadikan sebagai

metafora dalam menjelaskan tujuan dibangunnya suatu lembaga dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, tentunya dapat dilihat atau dipantau dari iklim atau suasana yang ada di dalam organisasi tersebut, harapan keberadaan organisasi tersebut dapat memberikan iklim humanis dan transendental dalam kehidupan organisasi. Menurutnya, metafora amanah diturunkan kepada metafora zakat, sehingga lembaga bisnis syariah berorientasi terhadap zakat. Pada perusahaan, zakat dapat dipandang sebagai biaya sehingga zakat akan mengurangi keuntungan yang tercermin dalam laba bersih yang dijadikan subjek zakat. Perusahaan akan menyukai untuk mengganti pembayaran zakat dengan memasukkannya sebagai elemen biaya. Jadi, bagian pengeluaran zakat akan kembali ke perusahaan dari zakat yang dikeluarkan.

Akuntabilitas yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah lembaga publik, dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang hak dan kewajibannya. Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal, juga tersirat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 282 yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stakeholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah.

Lembaga pengelola zakat dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitasnya, bukan saja mengandung nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan Badan Amil Zakat

dalam meningkatkan kepercayaan para muzakki (Fadillah,dkk 2012). Esensinya bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Dengan prinsip ini Badan Amil Zakat berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS secara jelas, jujur dan dapat dipercaya. Sebagai organisasi yang dijalankan oleh manusia, Badan Amil Zakat tak luput dengan kesalahan. Oleh karenanya dalam setiap pemberian laporan keuangan, Badan Amil Zakat juga meminta konfirmasi dan verifikasi dari muzakki atau Organisasi Pengelola Zakat jika terjadi kesalahan dalam pelaporannya.

Lembaga pengelola ZIS tidak dapat dianggap remeh mengenai pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Akuntabilitas yang merupakan suatu hal yang kerap dituntut oleh masyarakat dari sebuah lembaga publik, masyarakat perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Sebagai lembaga umat yang dijadikan sebagai naungan, Badan Amil Zakat sebagai Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki akuntabilitas yang tinggi meskipun mereka secara ikhlas menyerahkan dananya untuk keperluan ZIS (Yulinartati dkk,2012). Akuntabilitas timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent principal relationship* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (muzakki) dan Tuhan. Nilai profesional mewujudkan akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program. Akuntabilitas layanan merupakan fenomena yang memberi gambaran hubungan Badan Amil Zakat dengan para donaturnya (muzakki/munfiq). Bagi Badan Amil Zakat muzakki/*munfiq* mempunyai

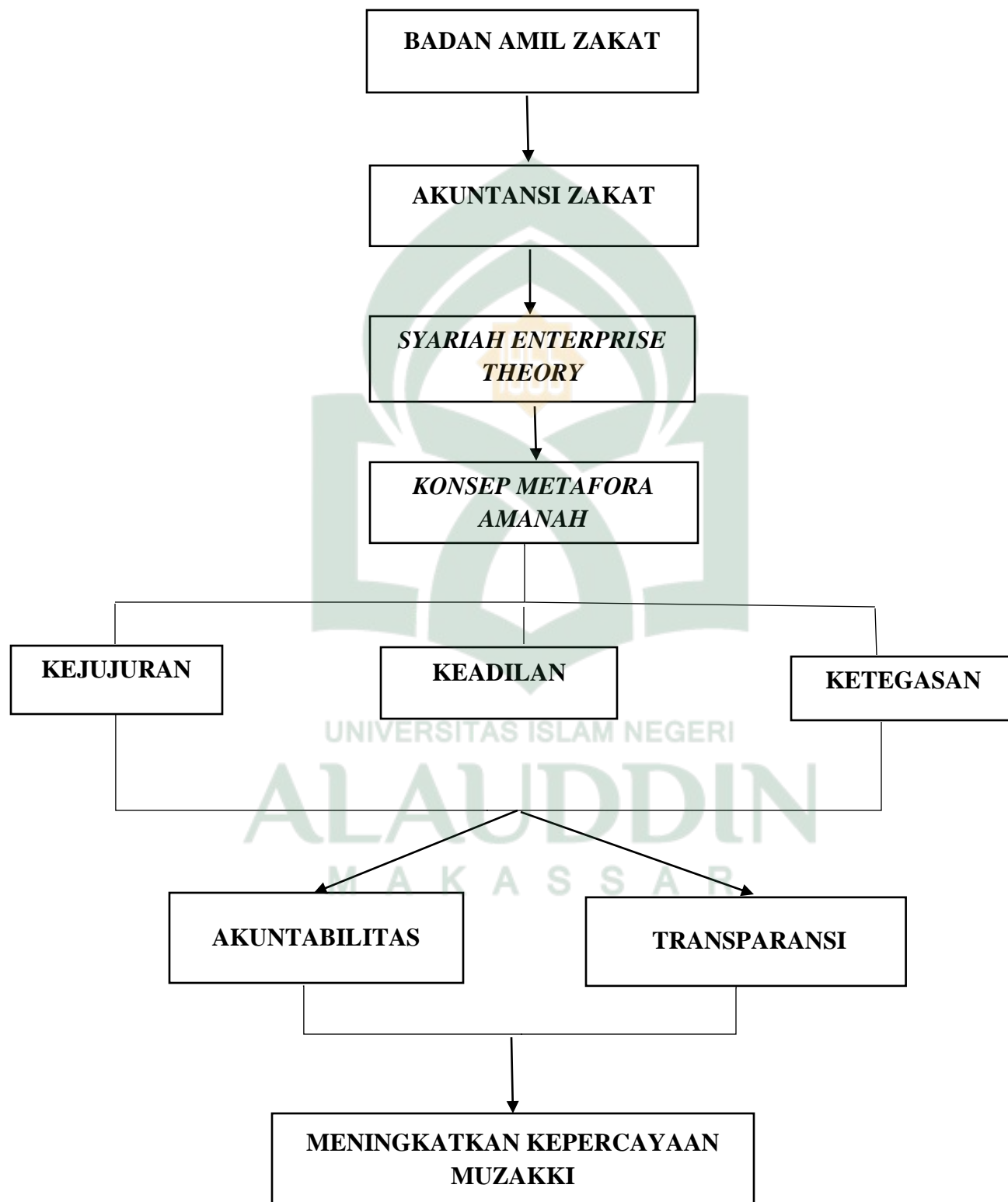


arti penting bagi keberlangsungan organisasi. Sedangkan akuntabilitas program merupakan fenomena pertanggungjawaban Badan Amil Zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk program dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Bentuk akuntabilitas layanan adalah dengan pengumpulan dana ZIS melalui layanan jemput zakat muzakki, silaturahmi karyawan Badan Amil Zakat kepada muzakki setiap 2 (dua) bulan sekali untuk memberikan majalah dan memberikan informasi mengenai program-program Badan Amil Zakat yang belum diketahui muzakki. Akuntabilitas layanan juga terwujud dalam pemberian layanan sesuai undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas program terwujud dalam pembuatan program distribusi dana ZIS yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

### ***I. Rerangka Fikir***

Rerangka fikir dikembangkan dari pemahaman perlakuan akuntansi zakat dengan pendekatan metafora amanah yang juga dilandaskan pada *Syariah Enterprise Theory* sehingga akan mampu menghasilkan suatu pengelolaan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan yang baik dan memberi pertanggungjawaban serta membangun kepercayaan terhadap para muzakki.

Gambar 2.1 Rerangka Fikir



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan (Hermawan dan Gianti, 2010). Jadi, dalam penelitian ini tidak dibenarkan mengisolasi (*menyendirikan*) individu atau kelompok kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan (Mulyadi, 2011). Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti seyogyanya memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa

tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan.

Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Rahmat (2009) salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Penelitian kualitatif ini sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang atau fenomena yang diamati.

Pendekatan dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif*, dan *holistik*. Dengan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan yang didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian ialah tanggung jawab pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat.

Lokasi penelitian ini tepatnya di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Masjid Raya No 55 Makassar yang merupakan salah satu lembaga penanggungjawab atas penerimaan maupun pengeluaran zakat, infaq, dan sedekah. Dimana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu organisasi yang mengayomi masyarakat sebagai salah satu penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di Sulawesi.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Dalam studi kasus nantinya akan mengarah pada pendekatan aspek metafora amanah untuk menganalisis pengelolaan akuntansi zakat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Rahmat, 2009). Disamping itu, studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.

## ***C. Jenis dan Sumber Data Penelitian***

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari responden berupa hasil wawancara dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada Pengelola Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi kriteria sebagai informan. Kriteria dari informan yaitu terdiri dari anggota Pengelola BAZ yang telah bekerja kurang lebih 3 tahun.

Tabel 3.1

No	Nama Informan	Instansi	Jabatan	Lama Bekerja
1.	Rasmuddin S.Ag	BAZ SulSel	Sekretariat	13 Tahun

Selain itu sumber data pada penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) dan sesuai dengan segala ketentuan (*informan*) yang telah ditentukan. Menurut Lofland dalam Moleong (2005) dalam Djaelani (2013) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **Teknik wawancara**

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dilakukan untuk mendapat informasi, keterangan, dan penjelasan mengenai permasalahan yang secara mendalam agar data yang diperoleh lebih akurat, lengkap, dan terpercaya karena diperoleh langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara apapun. Wawancara juga dimaksudkan untuk memverifikasi khususnya pengumpulan data. Dilakukan secara terstruktur bertujuan mencari data yang mudah di kualifikasikan, digolongkan, di klasifikasikan dan tidak terlalu beragam, dimana sebelumnya peneliti menyiapkan data pernyataan.

### **Studi Pustaka**

yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dimana metode pengumpulan data dengan mencari informasi informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature yang bertujuan untuk membentuk landasan teori. Dari berbagai literature-literatur tersebut senantiasa ditemukan konsep-konsep, teori, pemikiran seorang tokoh dan lain sebagainya, sehingga untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan dan menguji kebenaran konsep, teori dan pemikiran tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap buku-buku atau literatur yang menjadi objek penelitian tersebut (Harahap,2014).

### **Dokumentasi**

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan (Djaelani,2013). Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan. Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan/pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data



yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

### ***Internet Searching***

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari internet sebagai dasar untuk menambah referensi penelitian yang terkait.

### ***E. Instrument Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam hal ini alat yang dapat digunakan berupa :

- 1) Alat tulis menulis
- 2) *Handphone*
- 3) Referensi jurnal
- 4) Daftar pertanyaan/wawancara
- 5) *Mendownload* (mengunduh) beberapa file yang diperlukan tentang lembaga yang sedang menjadi pusat kajian.

### ***F. Metode Analisis Data***

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. Pada penelitian ini mengacu pada *Syariah Enterprise Theory* oleh Iwan Triyuwono serta disorot dengan menggunakan metafora amanah sebagai penguat dari teori sebelumnya. Makna dari pendekatan dengan kualitatif induktif adalah dengan melihat secara rinci akuntabilitas dari perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah secara lebih rinci melalui metafora amanah. Dengan demikian akan mampu membuat penarikan kesimpulan secara utuh dan diinterpretasikan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan dijadikan sebagai alat untuk menganalisis keterjadian pada lembaga amil zakat yang ada.

Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu diperlukan adanya proses reduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung selama penelitian berlangsung. Dengan demikian data yang telah direduksi dengan jelas akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama pada penelitian kualitatif adalah interpretasi atas problem penelitian. Oleh karena itu jika dalam penelitian peneliti menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka hal demikian lah yang akan menjadi perhatian peneliti dalam mereduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan fikiran.

## 2. Penyajian Data

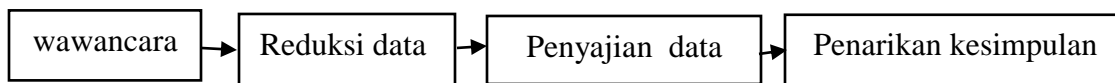
Penyajian data dalam hal ini digambarkan dengan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Dengan menyajikan data yang telah direduksi, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan program kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang mencakup verifikasi terhadap kesimpulan atas data yang di analisis agar lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh dan akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Gambar 3.1

Analisis data



Sumber: data diolah oleh peneliti (2017)

### ***G. Uji Keabsahan Data***

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi daripada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai penguji atas keabsahan data dimana untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya.

Dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan teori yang saling berkaitan sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum objek penelitian***

##### **1. Profil dan sejarah singkat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, potensi ini belum di manfaatkan karena di kelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan sehingga masyarakat masih mendistribusikan zakat mereka sendiri. Melihat kondisi demikian maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373. Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pemerintah daerah Sulawesi Selatan menindaklanjuti keputusan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001 tanggal 25 juni 2001 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan yang dikukuhkan pada tanggal 04 september 2001. Dan pada tanggal 29 januari 2007 bertepatan 10 muharram, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan mencanangkan hari sadar zakat, infak, dan sedekah.

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan

agama di Kota Makassar. Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang beregerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat. Unit Pengumpulan Zakat adalah organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah Provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berbadan hukum
- b. Memiliki data muzakki dan *mustahiq*
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pembukuan
- e. Melampirkan surat pernyataan siap diaudit

Pengukuhan di laksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Proses pengukuhan dapat pula di batalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut. Sementara pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjalankan fungsi dan tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan terletak di jalan Mesjid Raya No. 55 Makassar. Terdiri atas satu bangunan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu kantor, sekolah dan rumah bersalin.

## **2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

### **a. Visi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

“Mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum dhu’afa” dengan semboyan “berzakat ki’ melalui BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan untuk mensucikan harta ta’ dan memberdayakan kaum dhu’afa”.

### **b. Misi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- 2) Mendistribusikan dan memberdayakan zakat untuk kesejahteraan *mustahiq*.
- 3) Mengembangkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan atas dasar STAF (*shiddiq, tabligh, amanah dan fathonah*).
- 4) Mengubah *mustahiq* menjadi muzakki.

## **3. Program kerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

Sejak berdirinya, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada kaum dhu’afa. Program kerja yang terealisasi dengan baik di antaranya:



- a. Sekolah dasar anak indonesia (SDAI) Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 6 rombel dan telah menamatkan 4 angkatan, sejak tahun 2013-2016.
- b. Sekolah menengah pertama anak indonesia (SAMPAI) badan amil zakat provinsi sulawesi selatan memiliki 3 rombel dan telah menamatkan 2 angkatan tahun 2016-2017.
- c. Sekolah menengah kejuruan (SMK) keperawatan badan amil zakat provinsi sulawesi selatan memiliki 6 rombel dan telah menamatkan 1 angkatan tahun 2016.
- d. Klinik gratis mendukung program kesehatan gratis pemerintah provinsi sulawesi selatan.
- e. Pengobatan gratis kepada dhu'afa bekerjasama dengan BAZNAS kota makassar.
- f. Rumah bersalin Cuma-Cuma (RBC) badan amil zakat provinsi sulawesi selatan yang di resmikan oleh gubernur sulawesi selatan pada tangga 10 maret 2010, dan telah membantu masyarakat dhu'afa di kota makassar, mendukung program pemerintah dalam bidang kesehatan.
- g. Bantuan kepada marbot masjid dan taman pendidikan Al-Qur'an.
- h. Bantuan sembako untuk dhu'afa bencana alam.
- i. Buka puasa bersama dengan 2000 anak yatim tahun 2010-2011, 3000 anak yatim dan dhu'afa tahun 2012, 1000 anak yatim dan dhuafa tahun 2013-2014 dan tahun 2017.

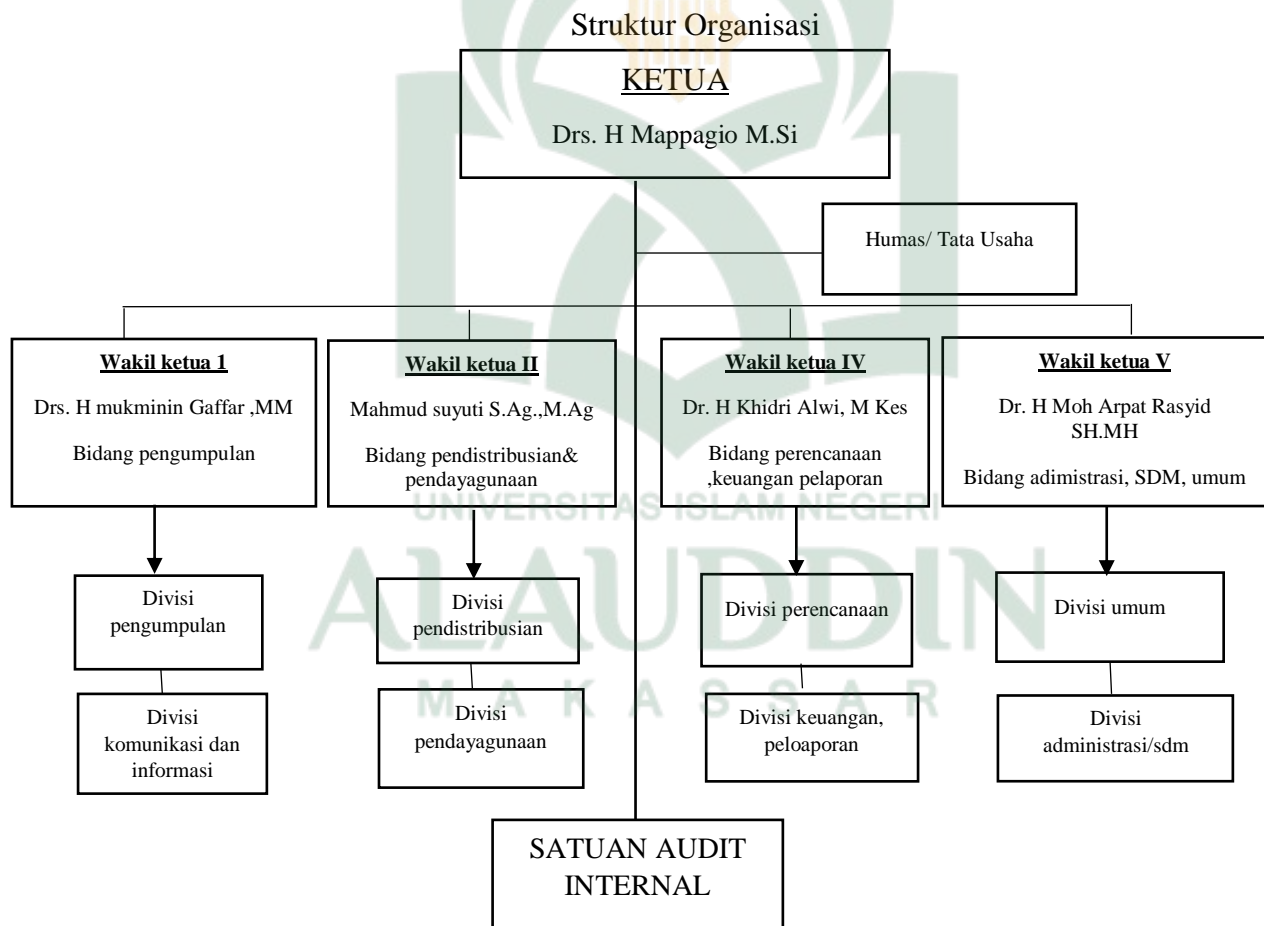
#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan manajemen dalam memperlancar mekanisme suatu perusahaan. Secara umum gambaran struktur organisasi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

#### Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

#### Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2016-2021



*Sumber: Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.*

## 5. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun tugas dari pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

### a. Tugas dewan pertimbangan antara lain:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Mengarahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib di ikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4) Memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta atau tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menunjuk akuntan publik.

### b. Tugas komisi pengawas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang di laksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Tugas badan pelaksana

- 1) Membuat rencana kerja.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan.
- 3) Menyusun laporan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas amanah Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam maupun keluar.

d. Tugas bidang pengumpulan dan pengembangan

- 1) Menyusun rencana pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengatur dan melaksanakan program pengumpulan dana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Melaksanakan segala usaha penelitian dan pengembangan sumber dana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, objek pendayagunaan, pengembangan organisasi, administrasi dan tata usaha.
- 4) Mempersiapkan peraturan-peraturan, formulir, sistem kerja dan penyuluhan.
- 5) Menyerahkan hasil pengumpulan dana ke rekening bank Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dan membukukan kepada bendahara.
- 6) Bidang pengumpulan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pengurus harian.
- 7) Bidang pengembangan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kerja kepada ketua pengurus harian.

e. Tugas bidang pendayagunaan dan pendistribusian

- 1) Melaksanakan program pendayagunaan dan pendistribusian dana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan proyek-proyek pendayagunaan, baik yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya maupun organisasi Islam.
- 3) Menetapkan proyek pendayagunaan oleh organisasi Islam.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua pengurus harian.

f. Tugas Sekretariat

- 1) Melaksanakan kegiatan tatausahaan.
- 2) Menyediakan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, serta mempersiapkan bahan laporannya.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehari-hari.
- 4) Membantu kegiatan ketua harian dalam mengkoordinasikan urusan-urusan serta bagian-bagian.

## ***B. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZ Provinsi Sulawesi Selatan***

### **1. Penghimpunan Dana ZIS Pada BAZ Provinsi Sulawesi Selatan**

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) selanjutnya akan di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga. Proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun berasal dari warga masyarakat Makassar, berbagai instansi, dan perusahaan-perusahaan. Dimana dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi *mustahiq* (Karim dan Syarief, 2009:4) dalam Endahwati (2014). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi *mustahiq*, tetapi juga bermanfaat bagi muzakki, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan sedekahnya, muzakki juga akan dapat mengikuti pembinaan agama, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur.

Berbagai strategi disiapkan untuk mendongkrak penghimpunan zakat. Beberapa program itu adalah sosialisasi ke kantor pemerintahan, masjid dan sekolah dengan menyebarkan spanduk dan baliho. Selain itu pula dilakukan penguatan lembaga zakat agar menjadi lembaga yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh umat muslim, pemberdayaan dan sinergisitas.

Penghimpunan dana pada Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi Selatan baik itu dana Zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain para muzakki dapat menyalurkannya dengan mendatangi langsung Badan

Amil Zakat terdekat, atau dengan layanan jemput zakat dimana pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri, serta bisa mendonasikannya melalui transfer ke rekening Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank syariah mandiri, Bank BNI syariah, dan Bank Muamalat.

Sebagaimana Anwar (2012) mekanisme pengumpulan/pemungutan zakat yang telah dilakukan yaitu:

“pertama, pengumpulan atau pemungutan secara *online*. Dapat dipilih langsung oleh muzakki antara lain melalui transfer ke rekening BAZ melalui perbankan yang ditentukan. Cara ini lebih efektif mengingat para muzakki tidak selalu memiliki waktu luang untuk mendatangi kantor BAZ/LAZ karena alasan kesibukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan komunikasi ini tentunya lebih memudahkan muzakki untuk menunaikan kewajibannya tanpa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Kedua, pihak BAZ/LAZ mengambil dengan cara mendatangi muzakki. Dalam hal ini pihak BAZ akan menyediakan layanan jemput zakat. Dengan menggunakan media telepon, sms, atau email. Pengambilan zakat ini pun dapat dilakukan oleh bendahara, juru pungut (*fundrasing*) atau staf BAZ/LAZ yang ditunjuk oleh pimpinan. Ketiga, muzakki dapat membayar zakat secara langsung ke kantor BAZ/LAZ. Dapat dilakukan apabila muzakki berada di lokasi yang berdekatan dengan kantor BAZ/LAZ atau berada pada jarak yang sangat terjangkau”.

Sejalan yang diungkapkan oleh Bapak Udin selaku pengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan informan BAZ Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan bahwa:

“Metodologinya sebenarnya banyak salah satunya itu dengan Sosialisasi undang-undang zakat ke masyarakat, kemudian ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi dia ada pada SKPD tapi sekarang diganti namanya jadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Nah masyarakat yang biasanya menyalurkan zakatnya ada yang langsung datang kesini, atau ada juga yang ke UPZ dulu, tapi ada juga sebagian masyarakat mau yang lebih mudah, lebih gampang tinggal transfer saja direkeningnya BAZ. Kan samaji sampai juga zakatnya” (Bapak Udin, 23/9/2017).



Penyaluran melalui Bank tentu memiliki cara tersendiri, yaitu muzakki sebagai pemberi sebelum melakukan transfer dana perlu menyampaikan niatnya kepada pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian muzakki akan diarahkan untuk menyalurkannya ke rekening yang telah ditentukan. Setelah melakukan transfer, muzakki kembali datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak Badan Amil Zakat.

Wujud dari pengumpulan zakat ini mampu memberikan gambaran hubungan antar Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan muzakki salah satunya adalah dengan adanya akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program (Endahwati, 2014). Sejatinya, akuntabilitas program ini merupakan fenomena pertanggungjawaban Badan Amil Zakat khususnya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan kepada *mustahiq* dalam bentuk program dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan bentuk akuntabilitas layanan yaitu dengan pengumpulan dana ZIS melalui layanan jemput zakat muzakki, silaturahmi karyawan Badan Amil Zakat kepada muzakki untuk memberikan majalah dan memberikan informasi mengenai program-program Badan Amil Zakat yang belum diketahui muzakki. Akuntabilitas layanan terwujud dalam pemberian layanan sesuai undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas program terwujud dalam pembuatan program distribusi dana ZIS yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

*Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa pengumpulan dana ZIS yang dilakukan tidak serta merta dilihat dari aspek fisiknya melainkan niat dalam hati, dan

rasa ikhlas dalam memberikan pelayanan. Sehingga dapat dikatakan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mempraktikkan akuntabilitas (amanah) secara menyeluruh baik dalam konteks *habluminallah* maupun *habluminannas*. Di sinilah sikap amanah dipupuk, sebab seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Sikap amanah, tidak hanya tumbuh dalam diri orang yang berzakat, tetapi juga pada para petugas atau amil zakat. Yakni dalam membagi dan menyalurkan seluruh harta zakat kepada yang berhak.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 30 yang berbunyi:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya :

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS. An-Nisa/4:30)

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran.

Randa dkk (2011) menyatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai sesuatu yang transenden sebagai hubungan pribadi antara Tuhan dengan manusia secara perorangan maupun dalam komunitas, sehingga individu atau komunitas dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diyakininya. Memandang bahwa optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai bila Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mampu menepis keraguan para muzakki. Caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

Bahwa ada tiga nilai kejujuran yang dapat diterapkan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan agar bisa berhasil dalam menjalankan amanah, yaitu kejujuran berniat, kejujuran lahiriah, serta kejujuran batiniah (Salle, 2015). Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Seorang hamba wajib jujur ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Senada dengan hal itu Jujur dalam bertindak berupa kejujuran dalam bertindak berarti tidak ada perbedaan antara niat dan perbuatan.

## **2. Pendistribusian dan pemberdayaan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan amanat UU 38 tahun 1999, bahwa dana zakat dapat di distribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Fadillah (2012) menyatakan bahwa kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang sosial lainnya. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang (Direktorat pemberdayaan zakat, 2015:11). Dana yang di salurkan untuk kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM, bantuan alat kerja, dan pembinaan usaha mikro/makro (Kurnia, 2008: 158).

Berkenaan dengan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di klasifikasikan menjadi 8 asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibn sabil (Diretorat pemberdayaan zakat, 2007:14). Hal ini tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>[647]</sup>.

(QS. At-Taubah/9:60)

<sup>[647]</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dengan turunnya ayat tersebut, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Dengan di jelaskannya lebih rinci oleh Allah dalam Al-

Qur'an tentang pendistribusian zakat, maka para petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat membagikan zakat sesuai dengan sekehendak hati mereka (Rahayu, 2014).

Hasil wawancara (Pak Udin), menyatakan bahwa:

“Kita mendistribusikan itu terprogram, terencana dan terarah. Salah satunya adalah itu tadi selain untuk ke 8 asnaf, lingkungan juga termasuk disitu. Ada juga pada bidang pendidikan, namanya adalah radial konsumtif, kemudian para panti-panti, ke TPA sama masjid dan muallaf. Jadi itulah yang kita rancang Ada namanya adalah indonesia cerdas adalah sama dengan lembaga (pendidikan), indonesia sehat (klinik), indonesia dai (indonesia dakwah). Sebenarnya kita masih kalah dengan lembaga-lembaga lain seperti Dompot Dhuafa, Baitul Mall Hidayatullah. Mereka itu indonesia dakwahnya sudah melatih dai-dai untuk dikirim ke pelosok-pelosok. Itu contoh-contoh kita untuk pengembangan zakat, artinya tidak habis melulu pada operasionalnya”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

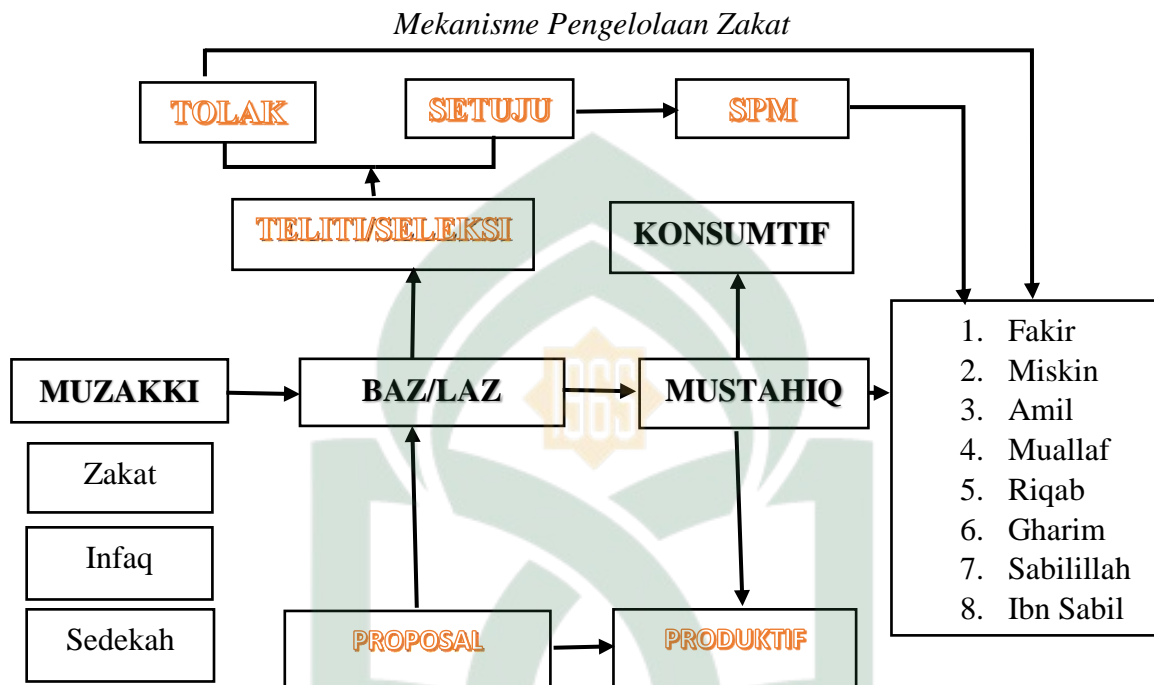
Sebagaimana yang di paparkan pada hasil wawancara tersebut, selain mendistribusikan pada ke 8 asnaf juga di peruntukkan untuk alam. BAZ Provinsi Sulawesi Selatan memandang bahwa alam merupakan salah satu yang perlu di zakati. Karna perlu untuk dijaga kelestariannya. Selain itu pula, pendistribusian yang dilakukan oleh pihak amil tidak terlepas dari sifat *Shiddiq* yang berarti benar, *Tabligh* artinya menyampaikan, *Amanah* berarti dapat dipercaya, dan *fathonah* berarti cerdas. Jika menilik pada pandangan pengelola keuangan zakat yaitu amil, dengan memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, amil dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (muzakki) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan. Sesuai dengan pemaparan dari pak Udin bahwa :

“Seorang amil juga harus berkomitmen juga memiliki sifat STAF yaitu: *shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah* (sifat rasulullah)”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Atas dasar ini, BAZ Provinsi Sulawesi Selatan tidak di perkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain selain dari yang telah di tentukan (8Asnaf). Disini terdapat nilai keadilan yang sama diantara semua golongan *mustahiq*. Maksud dari adil disini sebagaimana yang dikatakan Imam *Syafi'i* adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing *mustahiq* dan juga kemaslahatan umat islam semampunya. Spirit ungkapan tersebut adalah bahwa setiap orang hendaknya selalu berusaha sekuat tenaga untuk tirakat mencari Tuhan karena hanya dengan terus mencari kehidupan manusia akan terus berjalan (Sartini, 2009). Semua itu didasari semangat ingin mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai cita-cita setiap orang untuk mencapai keimanan yang lebih kompleks.

Mekanisme distribusi zakat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2



*Sumber: Badam Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan*

Kebijakan distribusi zakat telah mengacu aspek legalitas *mustahiq*. Aspek penting yang perlu dipahami dan diperhatikan terkait dengan kebijakan distribusi zakat yaitu ketepatan dalam menentukan *mustahiq*, terutama dalam mendefinisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai *mustahiq*. Perlu di perhatikan untuk mencapai ketepatan sasaran dan ketepatan penggunaan zakat. Hal ini tentunya bertujuan untuk menyelaraskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat (Anwar, 2012). Diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat khususnya *mustahiq* secara umum.



Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik para *mustahiq*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ad-Dzaariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian<sup>[1417]</sup>. (QS. Ad-Dzaariyat/51:19)

<sup>[1417]</sup> Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Ayat tersebut menerangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Badan Amil Zakat tetap dituntut untuk memperhatikan hal demikian. Hal ini di pertegas pula pada Al-Qur'an Surah Al-An'aam ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. An-aam/6:141)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang di dapatkan ada sebagian hak orang lain. Tentunya berkaitan erat dengan perintah untuk menunaikan zakat yakni dengan menyalurkan zakat nya kepada yang berhak melalui lembaga baik itu Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat. Sebagaimana yang dipaparkan pula:

“Untuk meningkatkan zakat ini tentunya kita mengembangkan *marketing mix*. Misalnya ada program yang dijual , begitu juga BAZNAS seperti ada rumah bersalin, klilik, sekolah SD SMP SMA SMK, itu namanya *marketing mix* program yang dijual. Setelah itu kita mulai bahasakan bahwa program ini bisa berjalan kalo tidak kita borongi secara jamaah, maksudnya ini bisa berjalan kalo anda membayar zakat”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Dari hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwasanya pemberdayaan zakat melalui dana yang dihimpun merupakan bentuk tanggung jawab terbesar khususnya kepada Allah dan sesama. (Triyuwono 2006:207) Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah yaitu pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (muzakki).

### ***C. Zakat, Infaq, dan Sedekah menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat***

Terdapat Empat makna yang menjadi definisi zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, yakni:

1. Zakat bermakna *Al-numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya ( dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan kesucian dan keberkahan harta yang telah di tunaikan kewajiban zakatnya.
2. Zakat bermakna *Al-thahuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karna Allah dan bukan ingin di puji maka Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
3. Zakat bermakna *Al-shalah*, yang artinya kebaikan atau keberesan. Bahwa dengan menunaikan zaat hartanya aan selalu baik dan jauh dari masalah.
4. Zakat bermakna *Al-barakat*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu di limpahkan keberkahan, kemudian akan berdampak pada keberkahan hidup.

Ipansyah *dkk* (2013) untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sudah pasti di perlukan manajemen zakat yang baik. Manajemen zakat yang baik juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien. Selain itu pula Kholis *dkk* (2013) pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat memisahkan dana infaq dengan dana zakat dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya sehingga amanah dari masyarakat bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi pengelolaan dana infaq paling tidak memberikan informasi tentang dari mana sumber dana infaq diperoleh dan kemana penyaluran dana infaq tersebut dilakukan.

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan, kemudian digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan. Pengelolaan Undang-undang Zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Purbasari, 2015). Dimana pengelolaan zakat dapat dilakukan individu ataupun kelompok. Namun mayoritas ulama sepakat, lebih baik pengelolaan zakat diatur dan dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pemerintah (Nasution. 2009:2).

Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Udin memaparkan bahwa:

“Regulasinya itu tentunya merujuk pada undang-undang. Undang undang 23 tahun 2011 kemudian dengan peraturan pemerintah dengan pp nomor 14 tahun 2014 Sebenarnya sederhanaji kalo zakat ini. Bahwa kalau orang

memahami sebagian dari harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain, kalo dia sadari itu.... Kesadaranji yang paling utama”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Dengan adanya UU No.23 Tahun 2011 yang memuat tentang pengelolaan zakat merupakan tantangan konsolidasi yang paling besar bagi pengelola zakat resmi, yaitu antara BAZNAS mulai dari pusat hingga daerah. Konsolidasi ini menjadi sangat penting karena mereka adalah ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan dan penyaluran zakat (Rahayu, 2014). Persepsi dan pandangan masyarakat mengenai wajah perzakatan Nasional juga sangat ditentukan oleh kinerja dan *performance* lembaga zakat ini. Termasuk tingkat kepercayaan muzakki juga sangat di pengaruhi oleh kinerja institusi amil zakat di dalam menjalankan amanah ini. Apalagi di era sekarang, dimana *service excellence* memegang peran yang sangat penting dalam menjaga loyalitas muzakki untuk ber zakat via lembaga amil.

Sebagaimana yang di ungkap kembali oleh Bapak Udin bahwa:

“Samaji kita Misalnya merokok? Kalo dia bayar rokok daripada bayar zakat. Okelah 30 ribu perhari jadi Perbulannya bisa jadi 900 ribu, gaji anda misalnya 4 juta perbulannya, agama minta perhitungannya satu juta itu 25 ribu. Jadi kalo gaji 4 juta kan 500 ribu, bagaimana? Rokok apa bayar Tuhan. Kalo mau menyadari itu.. tapi kan kebanyakan kita itu, kecurigaannya pada amil itu terlalu tinggi, ketika ditanya bayar zakat. Nggak.. tapi kenapa curiga sama lembaga amil zakat?”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Beliau menjelaskan masyarakat seharusnya memahami zakat sebagai salah satu ibadah sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim sebagaimana dalam UU tentang Pengelolaan Zakat tersirat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara amanah, profesional, dan terpadu dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Artinya, kesadaran masyarakat untuk

membayar zakat itu sudah ada namun untuk melaksanakannya masyarakat masih kurang pemahamannya. Rahayu (2014) menyatakan bahwa tingginya kekhawatiran muzakki jika zakat yang di berikan ke Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat tidak sampai kepada *mustahiq*.

Prioritas solusi pengelolaan zakat pada regulator adalah dengan pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat. Para pemimpin, pejabat, termasuk juga pengelola zakat, para *da'i* harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berzakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dipandang perlu dimasukan sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan akuntabilitas yang dimaksud adalah ketersesuaian antara rencana dengan pelaksanaan keuangan (Huda dkk, 2014). Sebagaimana *Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa perlu untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab yang sedang di emban kepada sesama tak terkecuali kepada sang pencipta Allah SWT. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengacu regulasi pemerintah UU 23 Tahun 2011, PP 14 Tahun 2014 Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tentunya tidak lepas dari keyakinan yang menjadi landasan untuk bertindak sebagai hasil refleksi yang mendalam bahwa akan memberikan daya manfaat bagi dirinya secara batin yang sulit diukur dengan nilai finansial. Dengan dasar keyakinan tersebut, maka akan membangkitkan rasa tanggungjawab dalam membangun kepercayaan muzakki dengan memberikan apa yang dimiliki untuk keberlangsungan hidup organisasi. Badan Amil Zakat Provinsi

Sulawesi Selatan di tuntut untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dengan selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dari kitab suci Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Bapak Udin bahwa:

“Walaupun regulasi setinggi apapun, kalo kita sebagai muslim tentunya lebih mengacu pada qalamullah. Kan banyak yang diikuti zakat itu dengan kalimat salat dan zakat, Persoalan regulasi itu sebenarnya bukan apa yang kita lihat tapi ada disini, kita punya qorun, maksudnya seniornya qalbun”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:110)

Dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah/2:277)

Landasan tersebut diperkuat dengan hadits Rasulullah Saw. yang di riwayatkan dari Ali r.a., Rasulullah SAW bersabda:



“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang - orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”. (HR. Ath-Thabrani).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah menjadi kewajiban setiap muslim dengan menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, penuh tanggung jawab. Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama (Meutia, 2010). Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

#### ***D. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZ Provinsi Sulawesi Selatan***

Sebagai lembaga pemegang amanah, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di haruskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat (Nainggolan, 2005:11). Untuk melaksanakan fungsi ini di perlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat tentunya membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan utama

akuntansi keuangan amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Parmono, 2010).

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil sejatinya telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan. Hal ini di dasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga standar akuntansi keuangan syari'ah ini murni disusun berdasarkan fatwa dan di terjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Sejalan dengan yang dipaparkan oleh Sumarno (2012) bahwa:

“Akuntansi zakat sangat diperlukan oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktivitas operasionalnya, baik untuk pencatatan dokumen-dokumen yang dimiliki atau mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan maupun memberikan informasi untuk mengambil keputusan”.

Di terbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di harapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya. Parmono (2010) menyatakan bahwa standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Udin bahwasanya:

“Keterbukaan lembaga tentunya akan memberikan pelaporan terhadap mereka, kalo tidak melalui pelaporan, setiap ada pendistribusian itu kita panggil mereka sebagai saksi bahwa ini loh uang anda kita distribusikan disini, misalnya kan kita punya beasiswa disini, kita panggil mereka dan

diserahkan secara simbolis. Ini salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas nya”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan wajib untuk melaporkan kinerja dan posisi keuangan serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah kepada para muzakki atau donatur. Dari pemaparan tersebut membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan secara terbuka melaporkan aktivitas-aktivitasnya.

Tugas pokok Badan Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, jadi peranan akuntansi bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada Lembaga Amil Zakat.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Kendati demikian Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Dimana dana yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Tujuannya untuk memudahkannya dalam mengetahui perubahan dana zakat dalam membuat laporan pertanggungjawaban, maka Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi

Selatan menggunakan buku kas untuk mencatat segala penerimaan dan pengeluarannya. Sebagaimana yang di paparkan oleh Bapak Udin bahwa:

“Jika ada dana yang diterima oleh pihak kami (Badan Amil Zakat) ya langsung di anggap sebagai bentuk penerimaan kas dan jika pun di distribusikan itu sebagai catatan pengeluaran nya Badan Amil Zakat bahwa ada dana yang keluar untuk kegiatan operasional dalam artian kalau pengeluaran untuk diberikan kepada para *mustahiq*”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pembukuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini di anggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk di kontrol.

Adanya tuntutan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas menjadikan organisasi pengelola zakat membuat laporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Megawati dan Trisnawati, 2014). Tercermin dalam *Syariah Enterprise Theory* senantiasa berpegang teguh pada prinsip dan aturan Tuhan yakni selalu mengedepankan sifat-sifat keteladan baik dalam berbuat atau dalam melaksanakan amanah dari muzakki. Seperti halnya Badan Amil Zakat dengan prinsipnya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat di andalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks syariah Islam (Rahman, 2015).

*Ilustrasi* pencatatan saat penerimaan kas (zakat) berdasarkan PSAK 109

**Tabel 4.1: jurnal penerimaan kas**

Tanggal	keterangan	Debet	Kredit
30/09/16	Kas	Rp. 300.000.000,-	
	Dana zakat		Rp. 300.000.000,-

*Sumber: data tahun 2016 penerimaan saldo dari rekening BAZ*

Pada Tabel 1 : menunjukkan bahwa adanya penerimaan kas yang diterima oleh pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian melakukan pencatatan sebesar jumlah yang diterima dari muzakki dan di akui sebagai penambahan dana zakat dalam bentuk kas. Namun, dalam pencatatan dana zakat Badan Amil Zakat hanya melakukan pencatatan pada buku kas masuk dan tidak melakukan penjurnalan-penjurnalan atas transaksi yang terjadi.

**Tabel 4.2: jurnal pengeluaran kas/penyaluran dana zakat**

Tanggal	keterangan	Debet	Kredit
30/10/16	Dana zakat	Rp. 84.000.000,-	
	Kas		Rp. 84.000.000,-

*Sumber : data primer 2016 (oleh peneliti)*

Tabel 2 : menunjukkan bahwa dana zakat yang di salurkan oleh pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan pada pencatatannya sama dengan saat pencatatan penerimaan kas, yakni secara langsung mencatatnya sebagai pengeluaran kas tanpa melakukan penjurnalan.

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas sejatinya tidak melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 : paragraf 17 dan 29 menyatakan bahwa:

“Zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada *mustahiq* di akui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas”.

Adapun cara menghitung perubahan kas pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan :

$$\text{Perubahan kas} = \text{Pemasukan} - \text{Pengeluaran}$$

Pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan bentuk pencatatan seperti itu di karenakan memudahkan untuk mengetahui total penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah serta mencerminkan jumlah kas yang riil dan objektif. Saat ini laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan neraca. Dengan alasan bahwa nantinya akan mengacu sesuai PSAK. Beliau memaparkan :

“Yang jelas itu laporan keuangannya bisa dibaca dan bisaji dimengerti, misalnya  $2+2=4$  atau  $1+1+1+1=4$ . Kan sama, tapi tetap harus logis”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Di tambahkan pula oleh pak Udin bahwa:

“Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan mengikuti sistem terpadu yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat, yang berkonotasi dengan sistem akuntansi yaitu 109, namun demikian Badan Amil Zakat Sulawesi Selatan masih menggunakan sistem manual sembari menunggu panduan yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat yang kan menjadi panduan seluruh Indonesia”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum mengacu pada standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Pada dasarnya prinsip yang di tekuninya hanya pada batas pemahaman mencatat keuangannya dengan cara pihak luar bisa lebih cepat mengerti apa maksud dan tujuan yang ingin/telah di capainya. Namun demikian Triyuwono (2000:230) menyatakan bahwa akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu badan/lembaga adalah untuk menghasilkan laporan yang bersifat keuangan yang akurat dan *accountable* untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut sangat banyak. Pemerintah selaku pemberi ijin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaanya.

### **1. Pengakuan dan Pengukuran**

Dalam PSAK 109, disebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Sedangkan menurut Suwardojo (2008) dalam Roziq dan Widya (2015) menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (di jurnal) atau tidak. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan.



Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan.

Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau menjelaskan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Roziq dan Widya, 2015). Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini adalah masalah penentuan masuk tidaknya informasi yang bersifat kualitatif ke dalam seperangkat statement keuangan.

Pengakuan dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di akui pada saat menerima dan mengeluarkan kas dan di ukur sesuai dengan jumlah yang di terima. Untuk pembayaran dengan metode transfer oleh muzakki di akui pada saat Badan Amil Zakat menerima rekening koran dari bank-bank yang telah di tentukan, dan di akui sesuai dengan jumlah yang di setor muzakki. Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh muzakki dengan cara mendatangi kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di akui pada saat kas di terima dan di kur dengan jumlah yang di berikan oleh muzakki.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Bapak Udin diatas bahwa:

“Dana zakat baik itu infaq maupun sedekah pada pihak Badan Amil Zakat Provinsi Selatan dia akui sebagai penambahan kas dan saat mendistribusikan di akui sebagai pengeluaran kas”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pengukuran zakat, infaq dan sedekah yang telah di lakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaannya sudah baik karna tidak lagi menerima aset nokas, dengan kata lain pengukuran di lakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar yang sejatinya telah di atur dalam PSAK 109.

Pengakuan dana zakat, infaq, dan sedekah di pandang sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh Badan Amil Zakat Provinsi Selatan dimana di dalamnya perlu di dasari oleh prinsip amanah yakni menjaga apa yang di amanahkan oleh pihak muzakki. Hal ini sesuai pula dengan *Syariah Enterprise Theory* memandang bahwa amanah merupakan bentuk tanggung jawab tertinggi yang wajib untuk di laksanakan karna bukan saja melibatkan manusia melainkan sang maha kuasa.

Tabel 4.3

**Hasil penelitian perbandingan pengakuan dan pengukuran pada pengelolaan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

NO	Pengakuan dan pengukuran		Keterangan
	PSAK 109	BAZ Provinsi Sulawesi Selatan	
1.	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.	Badan Amil Zakat provinsi Selatan mengakui dana zakat dari muzakki pada saat menerima dan mengeluarkan kas.	Sudah sesuai dengan PSAK 109
2.	Penyaluran zakat kepada <i>mustahiq</i>	Dana Zakat Infaq dan Sedekah yang diterima di akui sebagai	

	diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset.	penambah dan Zakat Infaq dan Sedekah dan dana ZIS yang keluar diakui sebagai pengurang kas.	Sesuai dengan PSAK 109
3.	Di ukur melalui satuan uang dengan menggunakan harga pasar dengan metode penentuan nilai wajar.	Dana zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dan hanya menerima aset kas	Sesuai dengan PSAK 109

*Sumber : data di olah peneliti (2017)*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi selatan dalam mengakui dan mengukur dana zakat, infaq dan sedekah telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109.

## **2. Pengungkapan dan penyajian**

Undang–Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa setiap Lembaga Amil Zakat/Organisasi Pengelola Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode

(Kristin P dan Umah, 2011). Pengungkapan dalam laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, Badan Amil Zakat diuntut harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan Badan Amil Zakat.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Namun demikian telah merincikan dana yang di terima seperti penerimaan dana dari berbagai pihak yang di kirim melalui bank-bank yang telah di tentukan.

Tabel 4.4

**Laporan dana****Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Nama Bank	Penempatan Penerimaan Zakat		
		Rek. Zakat	Rek. Operasional	Deposito *)
		(A)	(B)	(C)
1	Bank Syariah Mandiri Giro : 7002402704	27.594.103	0	300.000.000
2	Bank Muamalat Giro. 8010048900	15.763.026	0	150.000.000
3	Bank BNI Syariah Giro : 600.600.700.8	1.800.000	0	250.000.000

4	Bank BPD Syariah Giro :0510.053.25-7	19.387.340	0	550.000.000
5	Bank BPD SulSel Giro :0130-003- 000019518-4		112.538.569	
	Jumlah	<b>64.544.469</b>	<b>112.538.569</b>	<b>1.250.000.000</b>

*Sumber : Laporan dana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, 2016*

Laporan dana tersebut sebagai penerimaan dana non halal yang pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah dan di ungkapakan dalam laporan keuangan.

Dalam penyajiannya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum menggunakan PSAK 109. Hal ini tercermin pada laporan keuangan hanya terdapat laporan operasional dan laporan dana. Selain itu pula, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan juga menyajikan laporan penerimaan dan penyalurannya yaitu dengan cara memasang baliho-baliho maupun spanduk sebagai bentuk transparansinya.

Tabel 4.5

**Hasil penelitian perbandingan pengungkapan dan penyajian pada pengelolaan  
akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Pengungkapan dan Penyajian		Keterangan
	PSAK 109	BAZ Provinsi Sulawesi Selatan	
1.	Amil menyajikan dana Zakat Infaq dan Sedekah serta dana amil di sajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mneyediakan laporan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan operasional laporan dana.	Belum sesuai dengan PSAK 109
2.	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum mengelompokkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dan tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.	Belum sesuai PSAK 109

*Sumber : data di olah peneliti (2017)*

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi selatan dalam mengungkapkan dana zakat, infaq dan sedekah tidak mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109. Artinya tidak ada kesesuaian yang di lakukan.

***E. Pengelolaan Akuntansi Zakat dengan Pendekatan Konsep Metafora Amanah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan***

Menurut Mursyidi (2002) dalam Ritonga (2017) Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*meansurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi sebagai bagian dari sisi kehidupan manusia tidak terlepas dari Tuhan. Ke tauhidan menyadarkan bahwa semua yang ada di jagad raya hakikatnya adalah milik Allah SWT. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَۤاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ  
 بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Terjemahnya :

kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah/2/284)



Dan di pertegas pula pada Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 7 berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya<sup>[1456]</sup>. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid/57:7)

<sup>[1456]</sup> Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya nilai, tata cara dan pratek hidup yang di atur islam merupakan sebuah dimensi universal yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia, di dunia maupun akhirat (Maududi, 2012). Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya akan tunduk kepada sang pencipta. Ini berarti bahwa penerima amanah dalam melakukan segala sesuatu harus berdasarkan diri (*self-consciousness*) bahwa ia sebenarnya adalah khalifah Tuhan di bumi yang mempunyai konsekuensi bahwa semua aktifitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan (*the will of God*). Triuwono (2011) menyatakan bahwa dengan metafora amanah ini tidak saja mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan manusia tetapi juga kesejahteraan (kelestarian) alam yang dikelola dengan cara-cara yang adil dengan menggunakan potensi internal yaitu dengan akal dan hati.

Nilai amanah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan motivasi tersendiri kepada karyawan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena merasa yakin bahwa segala sesuatu akan di pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Dan bagi muzakki akan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa sebagian harta yang dimiliki adalah hak orang lain sehingga mampu meningkatkan kesenangan dan keikhlasan untuk saling berbagi dengan sesama. Sedang untuk *mustahiq* akan termotivasi untuk mengelola dan memanfaatkan dana ZIS yang di terima untuk mewujudkan harapan muzakki. Dengan demikian Ghufraanaka (2016) menyatakan bahwa dalam mengelola zakat semua prosesnya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Karna Allah maha mengetahui dan maha mendengar, maka lembaga pengelola zakat harus menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar.

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola zakatnya mengikuti prosedur dari pusat. Sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Udin yakni:

“Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan zakat bagi muzakki yang membayar zakat di kantor diberikan lembaran surat bukti zakat (SBZ) kepada muzakki, adapun pelaporannya semua BAZNAS berjenjang sesuai amanah undang-undang zakat No 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 sebagai panduan dengan jenjang pelaporan sebagai berikut :

- 1) BAZNAS Pusata ke Presiden dan DPR RI tembusan ke Kemenag RI.
- 2) BAZNAS Prov. Sul Sel ke Gubernur dan DPR Prov. SulSel tembusan Ke Kemenag.
- 3) BAZNAS Kab./Kota ke Bupati dan Wali Kota tembusan Ke Kemenag Kab/Kota” (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari rasa tanggung jawab dalam berupaya memaksimalkan penyaluran dan

pendistribusian dana ZIS, dan selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam (Inrawati. 2016). Terlihat jelas ada bahwa ada bukti konkret yang di berikan kepada muzakki yang membayar zakat. Bahwa dalam metafora amanah terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri (Triyuwono, 2011).

Ritonga (2017) menyatakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di laksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di dasarkan kepada prinsip syariah dan moral Agama Islam.
- b. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq dan sedekah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola muzakki dan *mustahiq* untuk selalu melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di harapkan akan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zalat, infaq dan sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip Produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif. Artinya *mustahiq* mengembangkan berbagai usaha jangka panjang.

Badan Amil zakat dalam menjalankan tanggungjawabnya perlu di dasari pada sikap *amanah*, *Tabligh*, *shiddiq* dan *fatonah*.

### 1) Amanah (Akuntabilitas)

Amanah adalah sesuatu yang di berikan kepada seseorang yang di nilai memiliki kemampuan untuk mengembannya dimana di dalamnya terdapat perilaku jujur, adil, dan tegas. Namun dengan kemampuannya, dia juga bisa menyalahgunakan amanah tersebut (Republika, 2016). Amanah berasal dari kata *amuna* yang bermakna tidak meniru, terpercaya, jujur atau titipan. Segala sesuatu yang di percayakan kepada manusia baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah SWT.

Di jelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 terkait dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya :

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>[180]</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.al-Baqarah/2:283)

Dan di pertegas pada Q.S Al-anfaal ayat 27 terkait dengan sifat khianat berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al-amfaal/8:27)

Sebagaimana yang di ungkap oleh Bapak Udin bahwa:

“Amanah itu kami anggap sebagai jalan menuju Ridhonya Allah. Apa yang di kerjakan semua karna Allah, dan semua milik Allah jadi perlu untuk di jaga dan di awasi”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pentingnya amanah dalam mengelola suatu lembaga terutama pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan telah di sabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W yakni :

“serahkan amanah kepada orang yang telh mengamanahi kamu dan jangan kamu menghianati orang yang telah menghianati kamu” (HR Abu Daud dan Tharmizi).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa :

“siapa saja di antara kamu yang kami jadikan amil zakat, lalu dia menyembunyikan kepada kami sebuah jarum atau lebih, maka ia telah khianat yang menyebabkan nya akan menanggung beban ketika datang pada hari kiamat” (HR Muslim).

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai alat pertanggung jawaban atas sumber daya yang digunakan secara

finansial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah (Endahwati, 2014). Hal ini sejalan dengan pernyataan Triuwono (2006:334) bahwa akuntansi bukan saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemilik, melainkan juga pada *stakeholders* dan Tuhan. Kejujuran dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas (Salle,2015). Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sehingga transparansi dikaitkan dengan tingkat akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin (Muhammad,2006).

Keutamaan dalam konsep amanah ini terletak pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, diuntut untuk dapat memberikan laporan keuangan dengan sewajarnya sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan penuh dengan rasa tanggung jawab dan transparansi. Adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah tersirat dalam penggalan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>[179]</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....” (QS. Al-Baqarah/2:282)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di catat dan dilaporkan kepada para *stakeholders* sehingga tidak akan ada lagi keraguan dan

kekhawatiran dalam pengelolaan dan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan sendirinya tercipta transparansi dalam pengelolaan dana tersebut (Maududi, 2012).

Tujuan mulia yang di emban oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana penjelasan pada penggalan ayat di atas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajibannya. Yakni setiap transaksi yang terjadi di catat sebagaimana mestinya dan kemudian membuat laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan. Nilai amanah akan melandasi pencatatan/pelaporan zakat, infaq dan sedekah secara jujur, sementara nilai profesional akan mendukung terciptanya akuntabilitas laporan sesuai aturan yang ada. Senada yang di paparkan oleh Bapak Udin bahwa:

“Terlepas dari itu semua seperti yang saya katakan tadi, tanggungjawabnya ya kami pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan secara tidak langsung melibatkan muzakki, mereka bisa melihat ohh ternyata dananya di salurkan disini (merujuk pada tempat). Tentunya semua itu tidak terlepas dari proses ya. Setiap ada dana yang masuk di catat, kalau ada dana yang keluar di catat” (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sejatinya memandang bahwa prinsip amanah sebagai prioritas utama dalam suatu entitas usaha yakni selalu bersikap terbuka kepada masyarakat umum khususnya pada muzakki. Keterbukaan ini di nampakan pada laporan keuangan yang di terbitkan. Hanya saja laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar yang di tetapkan. Namun demikian, telah ada upaya dalam



mengungkapkan laporan pertanggungjawabannya baik itu kepada sang pemilik hakiki dalam mewujudkan pelaporan berbasis aturan Nya. Sebagaimana yang di ungkap oleh Adnan (1999) dalam Maududi (2012) bahwa:

“Pada tataran ideal sesuai dengan peran manusia di muka bumi dan hakekat pemilik segalanya. Maka tujuan ideal adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Sang Pemilik Hakiki, Allah SWT. Namun karna Tuhan maha mengetahui, tujuan ini bisa di trasnformasikan dalam bentuk pegamalam apa yang sudah menjadi sunnah dan syariah Nya”

Amanah dalam pengelolaan zakat sangat penting karena sangat berkaitan dengan kepercayaan ummat. Selain amanah dalam pelaporannya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan juga harus amanah dari segi :

#### **a) Penghimpunan zakat**

Zakat yang di himpun oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari masyarakat (muzakki) untuk masyarakat (*mustahiq*). Dalam proses penghimpunanannya di perlukan sifat amanah yang mengutamakan kepentingan umum. Yakni menghimpun dana zakat dengan penuh ke ikhlasan serta dana yang di himpun di anggap sebagai titipan dari Allah SWT. Menjaga dengan sepenuh hati, dan berupaya untuk tidak melalaikan tugasnya serta tidak memilih-milih seberapa besarnya jumlah dana yang di salurkan melainkan dari keikhlasan sang pemberi.

#### **b) Pendistribusian zakat**

Amanah terkait dengan proses pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah bahwa dana di distribusikan kepada yang berhak yaitu kepada ke 8 asnaf dengan jumlah yang telah di tentukan oleh syariat, adapun dana yang di distribusikan tidak boleh melebihi kuota yang telah di tentukan. Pihak Badan Amil Zakat Provinsi

Sulawesi Selatan juga harus adil dalam menjalankan amanah ini yaitu tidak boleh berat sebelah, *mustahiq* harus di lihat sama agar semua mendapat bagian yang di amanahkan.

### c) Pendayagunaan zakat

Dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah perlu mempertimbangkan manfaat yang akan di dapatkan di kemudian hari. Seperti halnya dana zakat yang di himpun pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di gunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendirikan beberapa sekolah. Demikian halnya dana yang di salurkan kepada *mustahiq* perlu di lakukan kontrol agar dana yang di berikan tidak terbuang percuma.

### 2) *Tabligh*/Transparansi

Transparansi laporan keuangan dapat di analogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *tabligh*. *Tabligh* berarti menyampaikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 67 berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Terjemahnya :

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia<sup>[430]</sup>. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah/5:67)

Ayat tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu harus di sampaikan dengan benar, sebagai pengelola zakat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan harus senantiasa memegang teguh aturan Allah dengan menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi nilai kejujuran serta melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi.

Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi fisik privasi individu. Nilai transparan tampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah dalam mengumpulkan dana Zakat, infaq dan Sedekah dari muzakki dan mendistribusikannya kepada *mustahiq* (Endahwati, 2014).

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Udin bahwa:

“Pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses mengumpulkan dana tidak terlepas dari rasa penuh tanggungjawab, dana zakat di salurkan kemana dan dimana mereka muzakki harus tau. Itukan sebagai bentuk transparansinya kita dan dananya di gunakan untuk apa. Seperti sekolah yang ada di belakang kantor ini, kami berikan sumbangsih. Karna sekolah ini salah satu naungannya pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Senada dengan pernyataan di atas ditegaskan pula bahwa dalam mewujudkan nilai profesional yang amanah dan transparan akan dapat meningkatkan profesional program seiring dengan meningkatnya kepercayaan muzakki dan *mustahiq* terhadap program-program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengelola dana Zakat, infaq, dan sedekah.

Proses penghimpunan dan pendistribusian di lakukan dengan spirit keagamaan yang tinggi. Melihat betapa tingginya rasa ingin memberi dan berbagi kepada sesama. Kendala yang di hadapi menurut Bapak Udin berupa:

“Semua organisasi itu pasti ada kendalanya ya, mungkin saya lebih sering menyebutnya suka duka, suka nya itu kalo ada yang berzakat berarti orang tersebut telah dapat anugerah dari Allah. Orang yang tidak bayar zakat mungkin belumji dapat anugerah sebagai manusia pembagi. Tapi memang gini, orang berzakat itu belum rasa ada manfaatnya. Dia Hanya bilang berkurang uangku deh. Saya kasih tau ya donasi untuk kristen itu dia hampir lebih 50%, untuk gereja gereja yahudi hampir 50%, budha hindu itu sampai 20%, kita islam sudah 2,5% marah-marah lagi tapi mintanya surga”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa dalam proses penghimpunan zakat segelintir masyarakat masih ada yang menganggap bahwa zakat itu hanya sebagai pengurang harta. Namun demikian Badan Amil Zakat memandang bahwa masyarakat yang belum berzakat masih belum merasakan apa manfaat dari zakat yang sebenarnya. Untuk meningkatkan keinginan muzakki berzakat inilah di perlukan transparansi yang tinggi, transparansi bukan hanya kepada manusia melainkan kepada sang pemilik keinginan Allah SWT.

### 3) *Shiddiq/Jujur*

Kata jujur berasal dari bahasa arab yakni sama dengan *as-sidqu* atau *siddiq* yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Perilaku jujur di ikuti oleh sikap tanggungjawab atas apa yang di perbuat (*integritas*). Seperti halnya keikhlasan, kejujuran juga tidak datang dari luar tetapi dari bisikan kalbu secara terus menerus

mengetuk-ngetuk dan membisikkan nilai moral luhur yang di dorong hati nurani manusia yang fitrah.

Terlebih dalam mengukur keterjadian saat dana zakat, infaq dan sedekah di berikan hingga di salurkan yaitu jumlah dana zakat yang di terima dicatat dan diukur sebesar jumlah yang di berikan. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengukur nilai zakat yang di salurkan muzakki tidak di lebih-lebihkan atau di kurang-kurangi. Hal ini sesuai dengan yang di paparkan oleh Bapak Udin bahwa :

“Itu tadi, sifat jujur harus kita prioritaskan disini, jangan sampai dana yang seharusnya di keluarkan untuk *mustahiq* ternyata masuk ke kantong sendiri, itu yang tidak boleh, seperti juga misalnya ada dana zakat yang diterima dari muzakki sebesar 10 juta tapi yang di catat hanya 5 atau 7 juta, ini sudah menyalahi aturan Allah”. (Bapak Udin, 23/9/2017)

Artinya Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam segala tindakan yang di lakukan selalu merasa diawasi oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Karnanya perlu adanya ke hati-hatian dalam melaksanakan amanah umat ini. Sebagaimana di tegaskan dalam firman-Nya pada Al-Qur'an Surah Qaaf ayat 16 berbunyi:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ

الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (QS. Qaaf/50:16)

Ayat tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu yang di perbuat tidak akan terlepas dari pandangan Allah SWT. Besar kecilnya yang di lakukan Allah pasti dapat

mengetahuinya. Selain itu tidak hanya berprinsip pada kejujuran, namun Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan harus mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan ilmu pengetahuan yang memberikan tata cara dan praktik sistematis, rasional dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai bukti implementasi prinsip kejujuran dan keterbukaan terhadap muzakki.

#### 4) *Fathonah/profesionalisme*

Seorang amil harus memiliki sifat *fathonah*, yaitu cerdas, kompeten dan profesionalisme serta memiliki keahlian yang memadai. Kecerdasan yang dimiliki oleh Amil dapat mewujudkan ide-ide, kreativitas dan inovasi. Kadir (2015) menyatakan bahwa upaya mendayagunakan dana Zakat, infaq dan Sedekah merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan salah satu visi lembaga pengelola Zakat Infaq dan Sedekah yaitu profesional. Profesional mempunyai arti kemampuan (*competence*) memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) serta dilengkapi dengan pengalaman (*experience*).

Kemampuan profesional dalam mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah artinya bagaimana upaya mendayagunakan dalam bentuk amal salih sehingga para amil Provinsi Sulawesi Selatan bertindak sebagai orang-orang yang mampu membuat sesuatu menjadi kenyataan (*they, who make thing happened*). Karena itu, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan bukan hanya berarti menjalankan sistem pengumpulan, pendistribusian semata tetapi mulai meningkat pada pendayagunaan

dana yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan berkelanjutan berlandaskan syariah dan profesional (Kadir, 2015).

Kecerdasan yang ada pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam melihat potensi zakat yang ada, dengan tingginya potensi zakat yang ada membuatnya semakin gencar untuk mengeluarkan ide dan gagasan agar muzakki percaya dan menyalurkannya pada lembaga. Selain itu pula kecerdasan ini perlu di pergunakan sesuai syariat terutama dalam mengelola zakat. Bahwa zakat yang ada di tangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah titipan semata.

Tabel 4.6

**Hasil penelitian perbandingan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat  
Provinsi Selatan**

No	Pengelolaan Akuntansi Zakat	
1.	Prinsip dalam islam	Amanah bermakna tidak meniru, terpercaya, jujur atau titipan.
	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan	1. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sejatinya memandang bahwa prinsip amanah sebagai prioritas utama dalam suatu entitas usaha yakni selalu bersikap terbuka kepada masyarakat umum khususnya pada muzakki. Keterbukaan ini di nampakan pada laporan keuangan yang di terbitkan. 2. Menghimpun dana zakat dengan penuh ke ikhlasan serta dana yang di himpun di anggap sebagai titipan dari Allah SWT. Menjaga dengan



		<p>sepenuh hati, dan berupaya untuk tidak melalaikan tugasnya serta tidak memilih-milih seberapa besarnya jumlah dana yang di salurkan melainkan dari keikhlasan sang pemberi.</p> <p>3. Pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah bahwa dana di distribusikan kepada yang berhak yaitu kepada ke 8 asnaf dengan jumlah yang telah di tentukan oleh syariat, adapun dana yang di distribusikan tidak boleh melebihi kuota yang telah di tentukan.</p> <p>4. dana zakat yang di himpun pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di gunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendirikan beberapa sekolah. Demikian halnya dana yang di salurkan kepada <i>mustahiq</i> perlu di lakukan kontrol agar dana yang di berikan tidak terbuang percuma.</p>
	Keterangan	Sesuai dengan syariat islam.
2.	Prinsip dalam islam	<i>Tabligh</i> yaitu menyampaikan sesuatu dengan benar adanya.
	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai transparan tampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah dalam mengumpulkan dana Zakat, infaq dan Sedekah dari muzakki dan mendistribusikannya kepada <i>mustahiq</i> di wujudkan dalam menyampaikan laporan sesuai dengan apa yang terjadi.
	Keterangan	Sesuai dengan syariat islam namun belum berjalan dengan baik.

3.	Prinsip dalam islam	<i>Shiddiq</i> artinya jujur dalam bertindak
	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan	Dalam mengukur keterjadian saat dana zakat, infaq dan sedekah di berikan hingga di salurkan yaitu jumlah dana zakat yang di terima dicatat dan diukur sebesar jumlah yang di berikan. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengukur nilai zakat yang di salurkan muzakki tidak di lebih-lebihkan atau di kurang-kurangi.
	Keterangan	Sesuai dengan syariat islam
4.	Prinsip dalam islam	<i>Fathonah/cerdas</i>
	Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan	Kecerdasan yang ada pada BadanAmil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam melihat potensi zakat yang ada, dengan tingginya potensi zakat yang ada membuatnya semakin gencar untuk mengeluarkan ide dan gagasan agar muzakki percaya dan menyalurkannya pada lembaga. Selain itu pula kecerdasan ini perlu di pergunakan sesuai syariat terutama dalam mengelola zakat.
	Keterangan	Sesuai dengan syariat islam

Sumber: data di olah peneliti (2017)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun berasal dari warga masyarakat Makassar, berbagai instansi dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana pada Badan Amil Zakat provinsi Sulawesi Selatan baik itu dana Zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain para muzakki dapat menyalurkannya dengan mendatangi langsung Badan Amil Zakat terdekat, atau dengan layanan jemput zakat dimana pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun inisiatif amil sendiri, serta bisa mendonasikannya melalui transfer ke rekening Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank syariah mandiri, Bank BNI syariah, dan Bank Muamalat.

Penyaluran melalui Bank tentu memiliki cara tersendiri, yaitu muzakki sebagai pemberi sebelum melakukan transfer dana perlu menyampaikan niatnya kepada pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian muzakki akan diarahkan untuk menyalurkannya ke rekening yang telah ditentukan. Setelah melakukan transfer, muzakki kembali datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak Badan Amil Zakat.

Selain itu pula, pendistribusian yang dilakukan oleh pihak amil tidak terlepas dari sifat *Shiddiq* yang berarti benar, *Tabligh* artinya menyampaikan, *Amanah* berarti

dapat dipercaya, dan *fathonah* berarti cerdas. Jika menilik pada pandangan pengelola keuangan zakat yaitu amil, dengan memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, amil dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (muzakki) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti-bukti baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran untuk dicatat. Kendati demikian Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan penjurnalan, hanya melakukan beberapa pencatatan pembukuan dengan merincikannya sebagai akun penerimaan atau akun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menggunakan sistem *single entry* memiliki kelebihan dan kelemahan yakni pencatatan ini di anggap mudah dan cukup sederhana serta mudah untuk dipahami, namun tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap serta sulit untuk menemukan kesalahan dalam pencatatan dan sulit untuk di kontrol.

### **B. Saran dan Implikasi Penelitian**

Adapun saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya menerapkan perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109 sehingga laporan keuangannya dapat tersaji dengan tepat. Sehingga muzakki

tidak lagi merasa khawatir untuk mengeluarkan hartanya dan menyalurkan kepada lembaga-lembaga zakat lainnya terutama kepada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pengadaan perangkat lunak (*software*) akuntansi, bisa di jadikan sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas amil pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dapat memberi kemudahan dalam melakukan pencatatan serta laporan keuangan yang di hasilkan tepat. Dengan demikian laporan keuangan yang di hasilkan akan lebih transparan dan akuntabilitas yang bersifat amanah dapat menambah kepercayaan muzakki.
3. Sebaiknya ada perekrutan Sumber Daya Manusia yang notabennya ahli dalam bidang akuntansi. Karna pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan masih minim pengetahuan mengenai pencatatan akuntansi sesuai dengan prinsip yang berlaku. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang ahli di bidangnya tentu tidak akan menyebabkan muzakki merasa curiga lagi terhadap Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. 2012. Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Jurnal Humanity*. 7(2) : 1-13.
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. 20(1) : 82-92.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2007. *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*. Jakarta.
- Endahwati, Dian Yosi. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 4(1) : 1356-1379.
- Efferin, Sujuoko. 2015. Akuntansi, Spiritual, dan kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multipradigma*. 6(3) : 341-511.
- Fadillah, Sri., Nurleli, Rini Lestari, dan Helliana. 2012. Membangun Kepercayaan Konsumen: Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. 3(1) : 127-137.
- Fardan Ngoyo, Muh dan Lince Bulutoding. 2015. Kajian Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Artikel*. 1-15.
- Ghufraanaka. 2016. Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Aset Kelolaan pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3(5) : 375-390.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. 8(1) : 68-74.
- Hakim, Al. 2012. Prinsip dan tujuan dasar zakat. <http://nuralhakim.blogspot.co.id/2012/04/prinsip-tujuan-dasar-hukum-zakat.html>. Di akses pada tanggal 26 agustus 2017.
- Hariato, Syawal. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Artikel*. 1-22.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasnawati. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Berlandaskan Kearifan Lokal Manuntungi (Studi pada Badan Amil Makassar). *Artikel*. 1-37.
- Hermawan, Sigit dan Gianti Astriana. 2010. Akuntansi Zakat dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi*. 1(2) : 34-42.



- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 4(3) : 330-507.
- Hussain, Saddam dan Wahyuddin Abdullah. 2015. Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *Iqtisaduna*. 1(2) : 1-26.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK : 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Akrual*. 2(1) : 19-24.
- Inrawati, Rina. 2016. Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAZ Provinsi Jatim. *Artikel*. 1 : 28.
- Ipansyah, Nor., Nispan Rahmi, Rahman Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir*. 1(1) : 75-83.
- Kalbarini, Rahmah Yulisa dan Noven Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus :Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jestt*. 1(7) : 506 517.
- Karim, Adiwarman A dan A. Azhar Syarief. 2009. Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. 1 : 1-9. Zakat dan Empowering.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Quantum Media.
- Kadir, Syamsuddin. 2015. Menatap Masa Depan Zakat di Manggarai Barat. [http://akarsejarah.wordpress.com/2015/12/11/menatap-masa-depan zakat/di/maggarai/barat/](http://akarsejarah.wordpress.com/2015/12/11/menatap-masa-depan-zakat/di/maggarai/barat/). Di akses pada tanggal 30 oktober 2017.
- Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Kholis, Nur., Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muhammad Iqbal. 2013. Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. 7(1) : 61-84.
- Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Salam*. 15(1) : 1-18.
- Komala, Adeh Ratna. 2014. Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Survey pada Organisasi Pengelola Zakat di Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi*. 6(1) : 1-18.
- Koni, Wiwin. 2014. Akuntansi Syariah : Solusi Krisis Akuntansi Kapitalis. *Jurnal Al Mizan*. 10(1) : 107-120.
- Kristin P, Ari., dan Umi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Value Added*. 7(2) : 68-97.
- Mahmudi. 2003. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan teknik Fund Accounting*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII. Yogyakarta.



- Mahmudi. 2008. pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan *Teknik Fund Accounting*. <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>. diakses 01 september 2017.
- Maududi, Ahmad. 2012. Tabligh dan Amanah dalam Pengelolaan Zakat. <http://ahmadmaududi1593.blogspot.co.id/2012/11/tabligh-dan-amanah-dalam-pengelolaan.html?m=1>. Di akses pada tanggal 13 oktober 2017.
- Meutia, Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Muhammad, Rifqi. 2006. Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 7(1) :34-55.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 15(1) : 127-138.
- Nainggolan, Pahala. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2009. *Indonesia Development Report*. Jakarta: PEBS.
- Nirmatuniayah. 2012. Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Yayasan Daruttaqwa Semarang. 3(1) : 523-531.
- Nikmatuniyah. 2014. Komparasi System Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 5(3) : 345-510.
- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Parmono, Agung. 2010. Perlakuan Akuntnasi Zakat pada Lembaga Amil Zakat. *Artikel*. 1-20.
- Purbasari, Indah. 2015. Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Jurnal Mimbar Hukum*. 27(1) : 68-81.
- UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang: *Pengelolaan Zakat* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang *Pelaksanaan*.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good Governance* di Jember. *Karsa*. 22(2) : 1-17.
- Randa, Fransiskus., Iwan Triyuwono, Unti Ludigdo, Eko Ganis Sukoharsono. 2011. Studi Etnografi : Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolikyang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2(1) : 1-185.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. 5(9) : 1-8.
- Republika. 2016. 5 Makna Amanah. [Http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/02/17/o2of6i394-5-makna-amanah](http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/02/17/o2of6i394-5-makna-amanah). Di akses pada 10 oktober 2017.

- Rahman, Taufikur. 2015. Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (PSAK:109) Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*. 6(1) : 141-164.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. *Jurnal Kitabah*. 1(1) : 1-19.
- Salle, Ilham Z. 2015. Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(1) : 28-37.
- Sari, Olfita. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional dan Perbandingannya dengan Ketentuan PSAK 45 (1998) dan PSAK 109 (2011). *Artikel*. 1-20.
- Sartini, Ni Wayan. 2009. Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. 5(1) : 28-37.
- Septiarini, Dina Fitriasia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Akrual*. 2(2) : 172-199.
- Triyuwono, Iwan. 2006. Akuntansi Syari'ah : Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syari'ah di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006*.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Syariah. Perspektif, Metodologi dan Teori*. Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006a. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Radjawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2011. Mengangkat Sing Liyan untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal akuntansi multiparadigma*. 2(2) : 186-200.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Perspektif, Metodologi dan teori Akuntansi Syari'ah*. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Yulinartati., Lely Ana Ferawati Ekaningsih dan Akhmad Roziq. 2012. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management*. 1(1) :1193-1212.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta : Lintera Antar Nusa.



**FOTO (BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN)**



*Gambar 1 : saat melakukan sesi wawancara*



*Gambar 2: (Hasnawati dan Bapak Udin)*





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Sulawesi Selatan

**SHADAQAH**  
**PROPOSAL**  
**PRODUKTIF**

**ZAKAT**  
Tidak Mengurangi Harta

**8** KATEGORI YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

**SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR ZAKAT**

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mulia".

**QS. Al-Taubah (9) Ayat 60**

**KOMISIONER BAZNAS PROV. SULAWESI SELATAN**

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Sulawesi Selatan

**REKORDEK**  
130.003.000019510.4

**REKORDEK**  
510.953.000000.75.7

**REKORDEK**  
510.953.444

**REKORDEK**  
510.953.700.0

**REKORDEK**  
510.953.700.0

**REKORDEK**  
510.953.700.0

Gambar 3 dan 4: atribut BAZ Prov Sul Sel.









## RIWAYAT HIDUP



Assalamualaikum saya bernama **Hasnawati** atau yang akrab dipanggil hasna, Lahir di Desa Seb. Pebenaan 07 oktober 1994 tepatnya di Provinsi Riau. Anak pertama dari 3 bersaudara yang kami sebut sebagai “keluarga kecil H” karna awalan nama keluarga dimulai dengan huruf H. Lahir dari pasangan Abd. Hamid dan Haridah, Saya tumbuh dan besar di Provinsi Riau, namun demikian Orang tua saya sejatinya asli dari Sulawesi Selatan dimana Ayahanda berasal dari Sinjai Tengah dan ibu dari Bone Selatan.

Menempuh pendidikan dari SDN 039 Seb. Pebenaan (sekarang SDN 023 seb.pebenaan) lanjut ke SMP Negeri 03 Keritang, dan mengenyam bangku SMA Negeri 1 Keritang selama 2 semester karna dari kelas 2-3 SMA pindah ke Makassar (tanpa ditemani orang tua) dan lanjut di SMA Negeri 04 Makassar. Dan Alhamdulillah berkat Allah SWT dan doa dari kedua orang Tua pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi. Saya ikut dalam organisasi HmI (Himpunan mahasiswa Islam) walau kurang aktif. Dan saat ini syukur alhamdulillah telah menyelesaikan studi S1 selama kurang lebih 4 tahun 3 Bulan. Sebagai penutup *“merantaulah, karena dengan merantau engkau akan tahu arti hidup yang sebenarnya, Kerana pejuang sejati bukan hanya dilihat dari kebulatan tekad melainkan ada usaha dan do’a yang menyertai”*.